Rencana Kerja

Sekretariat Utama 2023

PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Secara khusus di lingkungan Sekretariat Utama BKN, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Jakarta, 01 November 2022
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara

Ditandatangani Secara Elektronik
Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP.

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Ruang Lingkup 2
D. Maksud dan Tujuan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021 4
A. Visi dan Misi 4
B. Tujuan 4
C. Sasaran Strategis 5
D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 10
BAB III RENCANA KERJA 2023 32
A. Sasaran Strategis 32
B. Indikator dan Target Kinerja 2023 33
C. Program Reform 2023 60
BAB IV PENUTUP 71
LAMPIRAN 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Utama…….. 9
Tabel 2.2 Realisasi IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2021……... 10
Tabel 2.3 Realisasi IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2021…… 11
Tabel 2.4 Realisasi IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2021……13
Tabel 2.5 Realisasi IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2021……16
Tabel 2.6 Tingkat Akuntabilitas Kinerja……...17
Tabel 2.7 Realisasi IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2021……...…….18
Tabel 2.8 Realisasi IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2021…….....18
Tabel 2.9 Realisasi IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2021……..19
Tabel 2.10 Realisasi IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2021…….…19
Tabel 2.11 Realisasi IKU 9. Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN Tahun 2021…….…….20
Tabel 2.12 Realisasi IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021……..21
Tabel 2.13 Realisasi IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama Tahun 2021……..21
Tabel 2.14 Realisasi IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai Tahun 2021……...22
Tabel 2.15 Realisasi IKU 13 Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan dan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun Tahun 2021…….23
Tabel 2.16 Realisasi IKU 14.Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021…….24
Tabel 2.17 Realisasi IKU 15. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Tahun 2021……25
Tabel 2.18 Realisasi IKU 16. Persentase Dokumen Kerjasama Tahun 2021……..26
Tabel 2.19 Realisasi IKU 17. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Tahun 2021……...26
Tabel 2.20 Realisasi IKU 18. Indeks Profesional ASN Settama BKN Tahun 2021…...27
Tabel 2.21 Realisasi IKU 19. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar Tahun 2021……...28

Tabel 2.22 Realisasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit Tahun 2021……28
Tabel 2.23 Realisasi IKU 21. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021……29
Tabel 2.24 Realisasi IKU 22. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021……30
Tabel 2.25 Realisasi IKU 23. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Tahun 2021……31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Settama Tahun 2023……. 35
Tabel 3.2 Rencana Target IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2023……..36
Tabel 3.3 Rencana Target IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2023……...37
Tabel 3.4 Rencana Target IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2023……38
Tabel 3.5 Rencana Target IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2023……39
Tabel 3.6 Rencana Target IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2023……40
Tabel 3.7 Rencana Target IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2023……41
Tabel 3.8 Rencana Target IKU 7. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2023……...42
Tabel 3.9 Rencana Target IKU 8. Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2023……43
Tabel 3.10 Rencana Target IKU 9. Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI Tahun 2023..44
Tabel 3.11 Rencana Target IKU 10. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2023….44
Tabel 3.12 Rencana Target IKU 11. Nilai Predikat IKPA Tahun 2023……..45
Tabel 3.13 Rencana Target IKU 12. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi…...47
Tabel 3.14 Rencana Target IKU 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023….48
Tabel 3.15 Rencana Target IKU 14. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama Tahun 2023……..49
Tabel 3.16 Rencana Target IKU 15. Persentase Penempatan Pegawai Tahun 2023……..50
Tabel 3.17 Rencana Target IKU 16. Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Tahun 2023……51
Tabel 3.18 Rencana Target IKU 17. Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088 Tahun 2023……52
Tabel 3.19 Rencana Target IKU 18. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2023……53
Tabel 3.20 Rencana Target IKU 19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Tahun 2023…….....54
Tabel 3.21 Rencana Target IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN Tahun 2023…….…...55
Tabel 3.22 Rencana Target IKU 21. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar Tahun 2023…….….56
Tabel 3.23 Rencana Target IKU 22. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit Tahun 2023……..…...57
Tabel 3.24 Rencana Target IKU 23. Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023……..……..58
Tabel 3.25 Rencana Target IKU 24. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023……..……..59
Tabel 3.26 Rencana Target IKU 25. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2023……..……..59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024…….5
Gambar 3.2 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024……...32
Gambar 3.3 Sistem Informasi Sekretaris Utama BKN…….56
Gambar 3.4 Arsitektur Verifikasi…….....64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan merupakan suatu dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah untuk periode satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2023 bertujuan untuk menerjemahkan Rencana Strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit di bawah Kesekretariatan Utama. Dengan begitu, implementasi perencanaan strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BKN dapat lebih optimal dan terpantau dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai di tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Sekretariat Utama dengan harapan seluruh kegiatan pada tahun 2023 dapat lebih terarah dan terukur.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

C. Ruang Lingkup

Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, koordinasi dan pemberian dukungan kepada seluruh unit organisasi BKN. Sekretariat Utama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan di BKN;
2. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BKN;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,arsip dan dokumentasi di lingkungan BKN;
4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
5. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretaris Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unit-unit organisasi dibawahnya yakni Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Umum dan Biro Hubungan Masyarakat, yang mana rencana kerja ini disusun sebagai dasar dari pembagian target-target kerja tahun 2023 bagi unit-unit organisasi yang berada dibawah lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur serta diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

A. Visi dan Misi

Rencana Kerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 yang dimana merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai Visi dan Misi serta Tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Visi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara adalah melaksanakan Visi Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut : "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, Sekretaris Utama BKN melaksanakan misi kelima BKN yaitu: "Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN" yang berfokus pada Sasaran Strategis ke 7 (tujuh) yakni "Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel" dalam Indeks Profesionalitas ASN BKN, Indeks Maturitas SPBE BKN, Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN, Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan Opini atas Laporan Keuangan BKN.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan tujuan kelima Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut : "Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka

Mewujudkan Visi & Misi Organisasi" Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara mencakup 4 (empat) dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara diantaranya: 1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten; 2. Terwujudnya sistem informasi ASN yang handal dan mudah diakses; 3. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima; dan 4. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel.

C. Sasaran Strategis

Sekretariat Utama BKN melaksanakan sasaran strategis ke-7 hingga 10 Badan Kepegawaian Negara seperti tersebut sebelumnya. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Utama BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis Sekretaris Utama BKN dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:

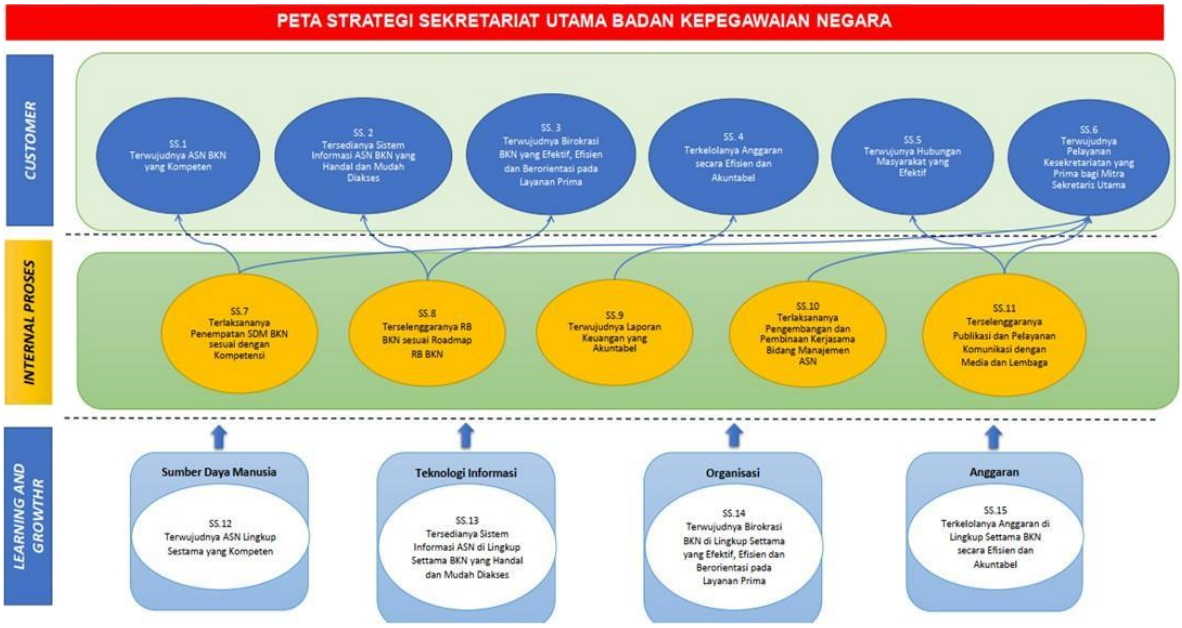

Gambar 3.1 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024
Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

1. *Customer Perspective* terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:
   a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
   b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses;
   c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
   d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel;
   e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif;
   f. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
2. *Internal Process Perspective* merupakan proses yang harus dilakukan Sekretaris Utama untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan. Terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis, sebagai berikut:
   a. Sasaran Strategis 7: Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi;
   b. Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN;
   c. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel;
   d. Sasaran Strategis 10: Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN;
   e. Sasaran Strategis 11: Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal.
3. *Learn* and *Growth Perspective* Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretaris Utama BKN. Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Sasaran Strategis 12: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
   b. Sasaran Strategis 13: Tersedianya sistem informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
   c. Sasaran Strategis 14: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
   d. Sasaran Strategis 15: Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

Dalam menilai pencapaian kelima belas Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2021 Sekretaris Utama menetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing IKU nya memiliki target kerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
Customer Perspective				
1	Terwujudnya ASN BKN yang kompeten	1	Indeks Profesional ASN BKN	77
2	Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses	2	Indeks Maturitas SPBE BKN	3,2
3	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	3	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	81
		4	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	77
		5	Level Maturitas SPIP	3
		6	Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	350
4	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel	7	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP
		8	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	82
5	Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif	9	Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Massa (TV, Cetak dan Online)	90%
		10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (80)

6	Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	11	Indeks kepuasan pelayanan Sekretaris Utama	86
Internal Process Perspective				
7	Terlaksanannya Penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi	12	Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi	91%
8	Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN	13	Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program Dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Roadmap RB per Tahun	100%
		14	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik	90%
9	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	15	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan	100%
10	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN	16	Persentase Dokumen Kerjasama	92%
11	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	17	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga *Stakeholder* Lainnya	98,3
Learn and Growth Perspective				
12	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten	18	Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN	80

13	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses	19	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkung Settama	100%
14	Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Settama yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima	20	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN	36
		21	Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	84
15	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel	22	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	99%
		23	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Utama
Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Utama

Evaluasi dari realisasi target sasaran kerja tahun 2021 ini selanjutnya akan dibahas pada halaman selanjutnya.

D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
77	77	78	80	70,42	78,42	98,02%

Tabel 2.2 Realisasi IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Realisasi yang dicapai tahun 2021 adalah sebesar 78,42 dari target yang ditetapkan sebesar 77 (101,84%). Nilai Indeks Profesional ASN BKN tahun 2021 berdasarkan perhitungan mandiri ini termasuk dalam kategori "**Sedang**". Pengukuran dan perhitungan Indeks Profesionalitas dalam periode ini telah dilakukan sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Mandiri Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 dengan nomor 02/LHE/SDM/I/2021 pada tanggal 28 Desember 2021. Pada tahun 2021, terdapat kendala dalam pengukuran Indeks Profesionalitas BKN, yaitu terkait dengan dimensi kualifikasi yaitu pendidikan formal dari SDM pada Kantor Regional BKN dan Unit Kerja BKN Pusat masih ada yang di tingkat SLTA dan sudah berusia lanjut serta belum terupdatenya data pegawai di SAPK.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2021 terdapat upaya dalam meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN baik terkait pelaksanaan pengukuran maupun penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKN untuk periode berikutnya yaitu:

1. Kantor Regional BKN dan Unit Kerja BKN Pusat selalu melakukan update secara berkala setiap pegawai yang telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis maupun kegiatan lain yang mendukung pengembangan kompetensi seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lain yang sejenis di SAPK;
2. Kantor Regional BKN dan Unit Kerja BKN Pusat diharapkan untuk dapat menyampaikan rekapitulasi data pegawai yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi (Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Diklat teknis lainnya) selama periode tahun 2020-2021 untuk digunakan sebagai data dukung untuk penilaian Indeks Profesional Tahun 2021 yang direncanakan akan menggunakan sumber data dari SAPK;
3. Biro SDM akan menerbitkan peraturan terkait Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri (CMB), Peraturan terkait Magang dan Komunitas Belajar dan membangun aplikasi CMB dimana dengan aplikasi tersebut rekap pelaksanaan CMB di unit kerja

dapat dimonitor secara berkala dan setiap pegawai dapat melaporkan kegiatan CMB yang telah mereka lakukan secara mandiri dan nantinya akan dilakukan validasi oleh atasan langsungnya dan secara otomatis akan mendapatkan JP dan juga sertifikat yang dapat diupload ke SAPK.

IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
3	3,2	3,5	4	2,84	2,92	73%

Tabel 2.3 Realisasi IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Indikator ini menggambarkan maturitas BKN dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE mengatur metode penilaian serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka pemantauan dan evaluasi SPBE mengalami perubahan regulasi yang semula diatur dalam PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2018, kemudian diubah menjadi PermenPANRB No. 59 Tahun 2020.

Dalam hal ini perhitungan perolehan realisasi untuk Indikator Utama Indeks Maturitas SPBE BKN ini didapatkan dari Nilai yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB dengan menggunakan formula perhitungan yang terdapat pada PermenPAN-RB No. 59 Tahun 2020. Pada tahun 2021 ini BKN menargetkan nilai Indeks Maturitas SPBE BKN sebesar 3,2 namun realisasi nilai yang diperoleh BKN pada tahun ini sebesar 2,92 dengan kategori "BAIK" atau dengan capaian kinerja 97,33% dari yang ditargetkan. Meskipun capaian kinerja BKN untuk indikator ini tidak mencapai 100% namun nilai yang diperoleh BKN berada di atas nilai rata rata Indeks Maturitas SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang hanya sebesar 2,77 dan nilai nasional 2,24.
Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan BKN dalam implementasi SPBE diantaranya:

1. Dari segi kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, BKN sudah menyusun kebijakan internal manajemen data yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Selain itu, BKN juga sudah melakukan penyusunan terkait kebijakan internal pembangunan aplikasi dan kebijakan internal jaringan intra instansi;

2. Dari segi perencanaan strategis SPBE, BKN sudah memiliki inovasi proses bisnis yang dibuktikan melalui hasil reviu proses bisnis;
3. Dari segi teknologi informasi dan komunikasi, BKN sudah merencanakan pembangunan aplikasi secara komprehensif;
4. Dari segi penerapan manajemen SPBE, BKN sudah melakukan penerapan manajemen keamanan informasi;
5. Dari segi audit TIK, BKN sudah melaksanakan audit keamanan informasi dari auditor eksternal;
6. Dari segi layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik BKN sudah berupaya memenuhi aspek ini pada layanan pengadaan barang dan jasa, layanan perencanaan yang sudah diperbaharui dan dilakukan evaluasi. Selain itu, pada layanan kearsipan dinamis layanan pengawasan internal pemerintah, dan layanan kinerja pegawai telah berkolaborasi dengan layanan lainnya; Dari segi layanan publik berbasis elektronik, BKN sudah memenuhi aspek layanan pengaduan pelayanan publik dan layanan publik sektor 1 (SAPK, MySAPK dan Docudigital), 2 (SSCASN, CPNS, P3K, DIKDIN) dan 3 (CAT). Khususnya pada layanan sektor 1 dan 2 telah dapat dipenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis optimum.

Sesuai hasil penilaian dari Kemenpan RB, masih terdapat beberapa kelemahan BKN dalam upaya implementasi SPBE, diantaranya:

1. Kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE;
2. Perencanaan Strategis SPBE;
3. Penerapan Manajemen SPBE;
4. Audit TIK;
5. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BKN pada tahun 2023 atas permasalahan diatas, diantaranya:

1. Menyusun satu kebijakan internal memuat seluruh pengelolaan SPBE di BKN dimulai dari arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK yang mencakup seluruh unit kerja;
2. Finalisasi pembangunan arsitektur SPBE kepegawaian dan arsitektur SPBE BKN serta Peta Rencana SPBE sekaligus penetapan kebijakan internal yang draf Keputusan Kepala BKN tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN;
3. Menuangkan upaya penyederhanaan proses bisnis yang sudah berjalan pada tahun 202 ini dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis yang diformalkan;
4. Pelaksanaan forum satu data sebagai bentuk tindak lanjut atas kolaborasi penerapan SPBE;
5. Menyusun dan melakukan penetapan terhadap pedoman manajemen resiko; manajemen aset, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE;

6. Penyempurnaan pembangunan Portal Satu Data ASN. Pada tahun 2023 akan dilakukan pengembangan terkait fitur, dashboard yang nantinya akan memuat penyajian anomaly data. (portal satu data ASN dapat diakses melalui https://satudataasn.bkn.go.id/data- search);
7. Pengembangan aplikasi pendukung dalam layanan akuntabilitas kinerja. layanan pengawasan internal pemerintah, dan layanan kinerja pegawai telah berkolaborasi dengan layanan lainnya;
8. Dari segi layanan publik berbasis elektronik, BKN sudah memenuhi aspek layanan pengaduan pelayanan publik dan layanan publik sektor 1 (SAPK, MySAPK dan Docudigital), 2 (SSCASN, CPNS, P3K, DIKDIN) dan 3 (CAT). Khususnya pada layanan sektor 1 dan 2 telah dapat dipenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis optimum.

IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80	81	82	85	76,86	76,27	76,27%

Tabel 2.4 Realisasi IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Indikator ini menunjukkan kumulatif nilai dari seluruh area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN baik itu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintahan daerah maupun pusat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik Korupsi,

Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Selain itu Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024, asas yang dikedepankan dalam Road Map Reformasi Birokrasi BKN adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Indeks Reformasi Birokrasi BKN pada tahun 2021 adalah 76,27. Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,59 dari tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks RB BKN adalah: 1) BKN belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun 2020; 2) Kinerja di BKN belum terintegrasi and berdampak pada stakeholder; 3) Perumusan SS belum mampu menggambarkan outcome, dan IKU belum memenuhi kriteria kualitas yang baik; 4) Penetapan target kinerja belum memperhatikan capaian kinerja sebelumnya; 5) Belum ada crosscutting; 6) Kualitas laporan kinerja belum optimal; dan 7) Evaluasi akuntabilitas internal belum berdampak terhadap peningkatan budaya kinerja.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan BKN dalam peningkatan indeks RB di tahun berikutnya adalah: 1) Reviu dan revisi Roadmap RB 2020-2024; 2) Mengintegrasikan rencana kerja dan RATL RB unit dengan instansi; 3) Menyusun instrumen RB yang fokus pada dampak kegiatan reform; 4) Penyederhanaan kebijakan; 5) Pembangunan *roadmap* SPBE; 6) Penyusunan HCDP dengan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi pegawai; 7) Reviu Renstra BKN 2020- 2024; 8) Penyusunan pohon kinerja BKN, dan beberapa kegiatan lain yang tercantum dalam matriks tindak lanjut LHE RB BKN.

Perolehan indeks RB BKN pada tahun 2021 sebesar 76,27 (BB) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 76,86 (BB). Pada tahun 2021, BKN telah berupaya secara optimal menindaklanjuti rekomendasi LHE RB tahun 2020 yang meliputi beberapa area perubahan sebagai berikut:

1. Pada area Manajemen Perubahan telah melaksanakan kegiatan telaah, penyusunan RATL serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas LHE RB BKN tahun 2020 yang didokumentasikan dalam bentuk *policy brief* dan telah diterbitkan oleh PPMASN BKN pada Juni 2021. Selain itu telah dilakukan pula reviu Road Map RB BKN 2020 - 2024 untuk menyelaraskan dengan Rencana Strategis BKN Tahun 2020 - 2024 dengan melakukan penajaman program percepatan

(Quickwins RB) serta fasilitasi penyusunan RATL terhadap semua POKJA RB, RB Unit Pusat dan Kantor Regional;

2. Untuk area Deregulasi Kebijakan, pada tahun 2021 BKN telah melakukan ekspansi dari kegiatan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak relevan bukan hanya pada tingkat regulasi yang diterbitkan oleh BKN saja namun juga pada tingkat UU, PP, Perpres, Permen, PerBKN, dll;
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi juga telah menyusun langkah lanjutan dari penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan melihat lebih dalam dampak dari penyederhanaan tersebut guna memastikan bahwa penyederhanaan tersebut menjadikan birokrasi di lingkungan BKN dapat lebih dinamis, lincah dan profesional;
4. Area Penataan Tatalaksana, area ini terkait erat dengan beberapa area lainnya yaitu area penataan dan penguatan organisasi serta area penguatan akuntabilitas. Untuk menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dan kinerja, BKN telah melakukan upaya penyempurnaan Peta Proses Bisnis dengan melakukan review Keputusan Kepala BKN Nomor 92.1/KEP/2019. Hasil review diformalkan dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 232.1/KEP/2020, dengan secara lengkap menjelaskan diagram yang menggambarkan hubungan yang efektif dan efisien antar organisasi di BKN, Matriks SOP Makro dan Matriks Kinerja;
5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, BKN telah melakukan tindak lanjut, diantaranya melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi pada Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP), review HCDP Tahun 2017 - 2021 yang dijadikan dasar dalam penyusunan HCDP tahun 2022 -2026 optimalisasi pelaksanaan pemetaan talenta dan proses asesmen serta pemanfaatannya dalam pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja telah melakukan langkah awal review Rencana Strategis BKN 2020 - 2024 dengan dilakukannya pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis guna mengukur sejauh mana implementasi Rencana Strategis dalam mencapai tujuan BKN dan mengetahui relevansi rencana dengan sasaran yang dicapai. Selain itu unit kerja di BKN pada tahun 2021 juga telah menyusun laporan kinerja triwulan, semester dan tahunan yang berkualitas dan dilengkapi dengan analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja;
7. Area Penguatan Pengawasan telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih efektif dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga dapat mengendalikan dan melaksanakan pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara baik, yang akhirnya akan tercipta pemerintah yang akuntabel dan berintegritas dengan dikeluarkannya KEPKA BKN No. 43.4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN, KEPKA BKN No. 83.2 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Manajemen Risiko Di Lingkungan BKN, SK Sekretariat Komite Risiko 2021 SK UPR (sesuai SOTK BKN 2020), 48 SK UPR (5 UPR JPT Madya, 28 UPR Unit Pusat, 14 UPR Kanreg dan 1 UPR Pusbang ASN. Selain itu seluruh unit telah melakukan Penilaian Risiko dan Profil Risiko Seluruh Unit Kerja sebagai tindak lanjut dari Sosialisasi SPIP (Luring & Daring) di Kanreg dan Pusat. Disisi lain BKN juga telah menyusun Laporan penilaian mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN Tahun 2020 dengan hasil Terdefinisi, dengan skor 3,962;

8. Area Pelayanan Publik selama tahun 2021 telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditunjukkan dengan telah dilakukannya upaya percepatan penyelesaian pengaduan dan konsistensi pelayanan pengaduan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan baik di BKN Pusat maupun Kantor Regional. Selain itu BKN juga berupaya memberikan kemudahan bagi seluruh PNS untuk memantau progres layanan kepegawaian mereka dengan dibangunnya aplikasi MySAPK yang saat ini telah dapat digunakan untuk memantau progres layanan kenaikan pangkat dan sampai dengan saat ini BKN masih berupaya meningkatkan layanan tersebut dengan menambah layanan yang meliputi mutasi dan pensiun.

IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
75	77	79	85	67,33	68,05	68,05

Tabel 2.5 Realisasi IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2022 atas penilaian tahun 2021 menunjukan bahwa Badan Kepegawaian Negara memperoleh nilai 68,05 atau predikat B. Hasil penilaian tersebut dapat diartikan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Badan kepegawaian Negara menunjukan hasil yang cukup baik.

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
Perencanaan Kinerja	30	21,55	21,71
Pengukuran Kinerja	25	16,25	16,38
Pelaporan Kinerja	15	9,93	10,05
Evaluasi Internal	10	6,40	6,53
Capaian Kinerja	20	13,20	13,38
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,33	68,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Tabel 2.6 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Sumber: LKj BKN 2021

Dari hasil Laporan Evaluasi yang telah dikeluarkan oleh KemenPAN RB dalam periode Renstra tahun 2020-2024, skor atau nilainya mengalami trend kenaikan yang positif setiap tahunnya. Penilaian dari 5 (lima) komponen yang dimulai dari Perencanaan kinerja sampai dengan Capaian Kinerja rata-rata mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 0,72%.

Terdapat beberapa rekomendasi dari evaluator KemenPAN RB dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kerja yang harus ditindaklanjuti secara seksama dan berkelanjutan, yaitu :

1. Menyempurnakan sasaran dan indikator di tingkat pusat dengan berdasarkan pada penjenjangan kinerja yang logis;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada unit kerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunannya agar kualitas indikator kinerjanya lebih terukur, relevan dan berorientasi hasil;
3. Menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan target kinerja tahun berikutnya;
4. Memperkuat peran pimpinan, melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi kedepannya;

Mendorong upaya koordinasi lintas sektor atau crosscutting dengan memperhatikan aspek kolaborasi;

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan memanfaatkan hasil analisis untuk perbaikan strategi kedepannya;
2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, memantau dan memonitoring agar rekomendasi ditindaklanjuti.

Menindak lanjuti rekomendasi di atas terkait dengan target capaian tahun 2023, bahwa untuk target atas Skor hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN tahun 2023 ditetapkan sebesar 80 di bawah target Renstra yang sudah direncanakan yaitu 85 karena melihat capaian history realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai target Renstra tidak memungkinkan dapat dicapai pada tahun ini,

dibutuhkan effort, sinergitas dan dukungan penuh dari semua pihak baik di unit kerja eselon I dan II.

IKU 5. Level Maturitas SPIP

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
3	3	4	4	3,176	3,188	3,188

Tabel 2.7 Realisasi IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Hasil validasi penilaian baseline atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BKN Tahun 2021 memenuhi karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3, kategori "Terdefinisi" dengan skor sebesar 3,181, dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,910.

IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
350	350	370	390	332,5	332,5	82,25

Tabel 2.8 Realisasi IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Realisasi yang dicapai tahun 2021 dari pelaksanaan Sistem Merit BKN sebesar 332,5 dari target yang ditetapkan sebesar 350 (95%). Nilai Sistem Merit tersebut terdiri dari capaian pada sejumlah aspek diantaranya Perencanaan Kebutuhan 93,8%; Pengadaan ASN 90%; Pengembangan Karir 73,1%, Promosi Mutasi 43,8%; Manajemen Kinerja 93,8%; Penggajian, Penghargaan, Disiplin 81,25%; Perlindungan dan Pelayanan 100%; dan Sistem Informasi 95,8%. Secara keseluruhan nilai Sistem Merit yang diraih BKN 332,5 dengan Indeks Sistem Merit sebesar 0,81 dan mendapat predikat "Sangat Baik" serta mendapat Piagam Penghargaan pada pada Anugerah Meritokrasi Penyerahan Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit Instansi Pemerintah di hotel Bidakara pada Kamis, 28 Januari 2021 dengan nilai 332.5. Capaian ini sudah baik namun dalam pelaksanaan Sistem Merit dibutuhkan adanya sistem informasi yang

mendukung terisinya jabatan yang ada di BKN oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut dalam penentuan *talent pool* sehingga dapat membangun SDM aparatur BKN yang berkinerja tinggi, netral, berintegritas dan profesional. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem Manajemen Talenta yang dapat menyajikan kompetensi pegawai dalam kelompok rencana suksesi manajemen talenta pada tahun selanjutnya.

IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 2.9 Realisasi IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2021 Badan Kepegawaian Negara masih memperoleh predikat WTP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BPK RI, sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kewajiban BPK RI ini, mengawali pemberian opini atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80	82	84	94	87,84	91,74	82

Tabel 2.10 Realisasi IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Sekretariat Utama terus berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2021 Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan

APBN (IKPA) adalah sebesar 91,74 dengan capaian akhir 109,56% dari target IKPA 82 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021. Pengukuran dilihat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu evaluasi IKPA memiliki 4 (empat) Aspek Pengukuran yang menjadi penilaian. Aspek Pertama, yakni Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus. Aspek kedua, Kepatuhan terhadap Regulasi yang terdiri dari Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek ketiga, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, dan Aspek keempat, Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Renkas dan Kesalahan SPM.

IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
90%	90%	93%	93%	91,76%	85,5%	95%

Tabel 2.11 Realisasi IKU 9. Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Massa Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Pada tahun 2020 realisasi adalah 90 % dari target 90 %. Formula pengukuran indikator ini adalah jumlah pemberitaan baik tentang BKN di media massa (TV,Cetak, Online) berbanding dengan total keseluruhan pemberitaan tentang BKN dikalikan dengan 100%. Selama kurun tahun 2021, total pemberitaan BKN meliputi 248 Berita Website, 39 Siaran Pers, dan 4 (empat) kali penyelenggaraan konferensi pers/media briefing yang disebarluaskan dan melibatkan awak media sebagai mitra komunikasi publik BKN. Berdasarkan hasil monitoring pemberitaan BKN yang dilakukan Biro HHK setiap sepekan lewat kerja sama dengan IMM Indonesia, rata-rata persentase sentimen pemberitaan BKN memperoleh lebih banyak sentimen netral dan positif dibanding sentimen negatif. Perolehan sentimen netral dan positif yang mendominasi pemberitaan BKN tahun 2021 mencapai 89% dari total rata-rata masing- masing perolehan sentimen (dihitung berdasarkan capaian sentimen netral dan positif dibanding sentimen negatif).

IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
90	80	81	N/A	69,12	73,13	91,41

Tabel 2.12 Realisasi IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Sepanjang Tahun 2021 pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BKN telah menerima sebanyak 24 permohonan informasi melalui PPID BKN yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun yang sama, selaku badan publik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, PPID BKN telah berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan mendapat predikat Cukup Informatif kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan capaian nilai 73,16, namun demikian terdapat peningkatan capaian nilai sebesar 4,04 dengan pembanding nilai capaian 69,12 pada tahun 2020. Dari capaian nilai yang didapat oleh BKN maka realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 91,45 % dari target capaian sebesar 100 % dengan indeks nilai capaian 80 berpredikat Menuju Informatif. Target pada Tahun 2024 N/A dikarenakan pada Rencana Strategis (Renstra) Sestama 2020-2024 tidak ada, tetapi pada PK dan Renja ada.

IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
85	86	87	95	81,49	84,01	97,68

Tabel 2.13 Realisasi IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Indeks Kepuasan Pelayanan yang diperoleh Sekretariat Utama yaitu sebesar 84,01 yang diambil dari rata-rata nilai Indeks Kepuasan Pelayanan yang dicapai oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BKN. Lima unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BKN, dengan rincian sebagai berikut : Biro Perencanaan dan Organisasi realisasi sebesar 84,44 dari target 86, Biro Keuangan realisasi sebesar 85,91 dari target 86, Biro Sumber Daya Manusia realisasi sebesar 82,46 dari target 90, Biro HHK realisasi sebesar 87,25 dari target 90 dan biro umum realisasi sebesar 80 dari target 86. Dari kelima unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BKN biro Keuangan

mendapatkan capaian indeks kepuasan pelayanan yang paling tinggi dengan berdasarkan realisasi sebesar 85,91 dari target 86.

IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
90%	91%	92%	95%	80%	91%	95,79%

Tabel 2.14 Realisasi IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Realisasi yang dicapai tahun 2021 adalah sebesar 91% dari target yang ditetapkan sebesar 91% (100%). Setiap mutasi pegawai sudah melalui Baperjakat (jabatan sesuai dengan Kualifikasi, Kinerja dan Kompetensinya). Pada tahun 2021, terdapat beberapa catatan terkait IKU 12 ini diantaranya adalah: belum adanya standar kompetensi jabatan sehingga sulit untuk menentukan kualifikasi pegawai, hampir sejumlah 60% pegawai di BKN sudah berusia diatas 50 tahun, sehingga sulit untuk ditingkatkan kompetensinya, dan adanya *gap* kompetensi sehingga dalam formasi/jabatan tertentu masih banyak diisi oleh pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Pada tahun 2022 akan dimulai pelaksanaan pengadaan pegawai P3K untuk mengisi jabatan yang memerlukan kompetensi yang kompleks dan profesional serta telah dilakukan pemetaan kompetensi di lingkungan BKN. Upaya untuk mendukung dan meningkatkan capaian IKU terlaksananya penempatan SDM sesuai dengan kompetensi pada tahun berikutnya, adalah: 1. Membuat Pedoman penyusunan Pola Karier; 2. Menyusun pedoman *Human Capital Development Plan* 2022-2026; dan 3. Menyempurnakan Sistem Manajemen Talenta.

IKU 13. Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan dan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.15 Realisasi IKU 13 Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan dan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Program kegiatan RB di BKN tahun 2021 dilaksanakan dengan mendasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 yang telah disusun kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun oleh setiap kelompok kerja area perubahan.

Adapun kegiatan yang tidak ada target maupun *output*, diantaranya:

1. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan Pelaksanaan Pengalihan jabatan Administrator dan Pengawas berdasarkan Peraturan MenpanRB Nomor 28 Tahun 2019, karena sudah dilakukan di tahun 2020;
2. Pedoman Akuntabilitas Kinerja telah disusun Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 1.8/KEP/2020 dan tidak ada perubahan ;
3. Penentuan Prioritas Satuan Kerja Penyelenggara Layanan Publik BKN karena telah dilakukan pada tahun 2020, dengan adanya Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selama ini offline menjadi secara online, salah satunya dapat digunakan aplikasi https://eppid.bkn.go.id/ , selain itu di pusat dan pelayanan di kantor regional https://surabaya.bkn.go.id/ dan https://sinoken.bkn9jayapura.net/
4. Penetapan Maklumat Pelayanan, sudah ada.

IKU 14. Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara Elektronik

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	90%	91%	N/A	100%	90%	N/A

Tabel 2.16 Realisasi IKU 14.Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 terkait dengan IKU Persentase Realisasi Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian yang sudah mencapai 100% dengan tercapainya target sebesar 90%. Persentase paket pengadaan yang dilakukan secara elektronik dengan melihat jumlah paket yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE dalam bentuk persen. Perbandingan paket yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE dengan seluruh paket yang diusulkan ke UKPBJ dan pejabat pengadaan di Kanreg dan Pusbang dikalikan 100%. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan diketahui paket yang dilaksanakan melalui aplikasi. Monitoring dan evaluasi paket yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE 4.3. Persentase paket pengadaan barang dan jasa tahun ini telah terealisasi sebesar 90%.

Pada indikator ini, perlu disesuaikan dengan kebijakan yang ada di instansi pembina, LKPP. Konsep Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dapat menggantikan indikator ini dengan cakupan yang lebih holistik terhadap pengadaan barang/jasa. Sehingga berdasarkan evaluasi ini maka pada tahun 2023 diharapkan dapat menggunakan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai indikator baru di lingkungan Sekretariat Utama.

IKU 15. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.17 Realisasi IKU 15. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan tepat waktu, terdiri dari:

1. Laporan Penilaian PIPK Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) BKN T.A. 2020
2. Laporan Keuangan Semester II BKN TA. 2020 Unaudited
3. Laporan Keuangan BKN TA. 2020 Audited
4. Laporan Keuangan Semester I BKN TA. 2021
5. Laporan Keuangan Triwulan III BKN T.A. 2021

Sebagai pendukung Statement of Responsibility (SOR) pada Laporan Keuangan, penilaian penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilaksanakan oleh BKN. PIPK dirancang secara spesifik untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kewajiban penyampaian laporan PIPK pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang tepat waktu, diatur dalam Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-125/PB.1/2020 Tanggal 09 November 2020 perihal Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pemerintah Pusat.

IKU 16. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
92%	92%	92%	92%	94%	85%	92,39%

Tabel 2.18 Realisasi IKU 16. Persentase Dokumen Kerjasama Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Capaian Persentase Dokumen kerjasama yang disepakati adalah 85% dari target yang ditetapkan 92%. Sepanjang tahun 2021 dokumen kerjasama untuk seluruh kegiatan kerjasama berdasarkan subjek kerjasama, objek kerjasama dan bentuk kerjasama baik Luar Negeri maupun Dalam Negeri. Pada tahun 2021, seperti tahun sebelumnya, pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan luar negeri seluruhnya diselenggarakan secara daring. Keuntungannya, delegasi Indonesia yang diikutsertakan dapat lebih banyak, tidak terkendala pembiayaan. Termasuk pula kegiatan ekspose kerja sama luar negeri yang dapat melibatkan peserta tidak hanya kantor pusat, namun juga seluruh kantor regional dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN.

IKU 17. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga *Stakeholder* Lainnya

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
95%	98,3%	98,3%	98,3%	98,20%	93%	94%

Tabel 2.19 Realisasi IKU 17. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Tahun 2023
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Untuk realisasi pemberitaan yang disebarluaskan oleh Sekretariat Utama khususnya Biro HHK BKN tahun 2021 meliputi: 246 Berita Website, 38 Siaran Pers, dan 4 (empat) kali penyelenggaraan konferensi pers/media briefing yang disebarluaskan dan melibatkan awak media sebagai mitra komunikasi publik Biro HHK. Berdasarkan pemberitaan yang disebarluaskan Humas BKN sepanjang tahun 2021, capaian persentase jumlah media dan stakeholder yang memuat pemberitaan BKN yang direkapitulasi melalui kerjasama dengan IMM Indonesia, yakni berjumlah 1.100 media yang mencakup media cetak dan media online. Dengan demikian capaian publikasi program dan kegiatan BKN yang diterbitkan media dan lembaga stakeholder lainnya selama kurun tahun 2021 (komparasi antara target 1.200 dan

realisasi 1.570) memenuhi target Perjanjian Kinerja Biro Humas, yakni rata-rata persentase mencapai 93% atau bernilai Baik.

IKU 18. Indeks Profesional ASN Settama BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
80	80	81	82	67,77	76,13	92,84%

Tabel 2.20 Realisasi IKU 18. Indeks Profesional ASN Settama BKN
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama pada tahun 2021 berkategori "**Sedang**" dengan rata rata nilai 76,13. Apabila diklasifikasikan secara detail, indeks yang didapat adalah Kualifikasi : 13,15 Kompetensi : 31,30 Kinerja: 26,80 dan Disiplin: 4,87. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi dengan bobot 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan mandiri Indeks Profesional ASN Sekretariat Utama pada tahun 2021 sebesar 76,13 telah mengalami peningkatan dibandingkan nilai yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 67,77. Hal ini dapat tercapai karena Sekretariat Utama melalui Biro SDM senantiasa selalu berupaya melakukan *updating* secara berkala untuk setiap pegawai yang telah menyelesaikan pelatihan teknis maupun kegiatan lain yang mendukung pengembangan kompetensi seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lain yang sejenisnya.

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesional Sekretariat Utama di tahun depan maka akan terus dilakukan *update* secara berkala di SAPK untuk setiap pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi, baik itu yang telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis maupun kegiatan lain yang mendukung pengembangan kompetensi seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lain yang sejenisnya. Selain itu di tahun yang akan datang juga akan dianggarkan untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Utama untuk dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pejabat Administrasi dan pelatihan fungsional bagi pejabat Fungsional serta pelatihan teknis atau pengembangan kompetensi lainnya seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek) sebagai upaya untuk dapat meningkatkan tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Sestama.

IKU 19. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
65%	100%	100%	100%	100%	95%	100%

Tabel 2.21 Realisasi IKU 19. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN pada tahun 2021 sudah terealisasi sebesar 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa BKN dalam hal ini Sekretariat Utama berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah mencapai nilai 3 dengan kategori baik.

Berbagai layanan digital yang sudah diterapkan antara lain BKN LBP, SIPENDEKAR, E-Kinerja, Aplikasi SPSE, SIONI, SIPEPI, SPID, Digital Signature, SIMONBAJA, Aplikasi Surat, Aplikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab, serta SIAVA. Pengembangan pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi terus menjadi fokus Sekretariat Utama dalam memberikan layanan kepada unit-unit.

IKU 20. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
36	36	36	36	34.54	34.54	95.9%

Tabel 2.22 Realisasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan angka yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan PMPRB Tahun 2021, nilai Pelaksanaan RB Settama sebesar 34.54 dari total bobot 36.3. Dalam proses mendukung terlaksananya reformasi birokrasi, Sekretariat Utama telah menyusun Tim Kerja Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Sekretariat Utama BKN dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama Nomor 23/KEP/SESMA/2020. Adapun tugas dari tim kerja RB ini adalah:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BKN;
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud terutama Tim Kerja Reformasi Birokrasi BKN sebagai tim kerja utama di Lingkup BKN;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja RB kepada Sekretaris Utama BKN sebagai penanggung jawab pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Utama.

IKU 21. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
84	84	85	86	71.96	73.95	85.98%

Tabel 2.23 Realisasi IKU 21. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Settama BKN yang menggambarkan nilai akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja yang dievaluasi oleh inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Indikator ini merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan SAKIP di Lingkup Sestama BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja di Lingkup Sestama. Beberapa dokumen yang menjadi bahan penilaian adalah Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 yang merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024, dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021, dokumen Rencana Aksi (RA) Tahun 2021 serta dokumen pendukung terkait lainnya. Berdasarkan penilaian atas lima komponen dan dokumen di atas, pada tahun 2021 Sekretariat Utama mendapatkan nilai LHE sebesar **73,95** dengan kategori **B (Baik).**

IKU 22. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
98%	99%	100%	100%	98,86%	90,58%	100,39%

Tabel 2.24 Realisasi IKU 22. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Sekretariat Utama dalam DIPA tahun 2021 memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp. 310.719.957.000, anggaran tersebut untuk membiayai 1 Program dan 4 Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Sekretariat Utama BKN. Namun dengan terjadinya wabah Pandemi Covid 19 Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran tentang Refocusing dan realokasi Kementerian/Lembaga TA 2021 sebanyak 4 kali. Adapun SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Nomor : S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA.2021 penghematan sebesar Rp.15.838.920.000,- Nomor :S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA.2021 penghematan sebesar Rp,2.629.789.000,- dan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA.2021 tahap IV dengan penghematan sebesar Rp,10.971.681.000. Sekretariat Utama BKN kemudian merefocusing semua kegiatannya di 1 (satu) program (Dukungan Manajemen dan tugas Teknis Lainnya) dengan 4 (empat) kegiatannya yaitu : kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (3630) ,Pengelolaan Organisasi dan SDM (4842), Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum (4843) dan Legislasi dan ligitasi (4844), yang sudah berjalan. Refocusing yang dilakukan oleh Sekretariat Utama BKN berimplikasi kepada perubahan postur anggaran yang sudah diberikan dengan pengurangan dari pagu awal sebelumnya sebesar 8,60% atau sebesar Rp. 26.734.355.000,-. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 79,70%, realisasi tahun 2021 mencapai 91,78% atau mengalami peningkatan sebesar 12,08.

IKU 23. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasi Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.25 Realisasi IKU 23. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2021
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama telah menindaklanjuti segala temuan dan catatan dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya oleh BPK yang menjadikan catatan-catatan tersebut sebagai perbaikan dan meminimalisir untuk tidak terulang kembali ditahun berikutnya, meningkatkan pengelolaan keuangan serta pengelolaan evident pertanggungjawaban keuangan untuk lebih baik lagi, dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pertanggungjawaban keuangan.

Pada tahun 2022, dari 15 (lima belas) rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan di Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun Anggaran 2021, Unit Kerja di Lingkungan Biro Keuangan tidak mendapatkan temuan dari inspektorat maupun BPK. Adapun dari 9 (sembilan) rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada BKN secara keseluruhan, yang belum terselesaikan di Semester I 2023 ini, terdiri dari 4 temuan administratif, 3 temuan terkait audit kinerja, dan 2 temuan yang harus menyetorkan ke kas negara.

BAB III RENCANA KERJA 2023

A. Sasaran Strategis

Sekretariat Utama BKN melaksanakan sasaran strategis ke-7 hingga 10 Badan Kepegawaian Negara seperti tersebut sebelumnya. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Utama BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Diturunkan menjadi Sasaran Strategis Sekretaris Utama BKN dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:

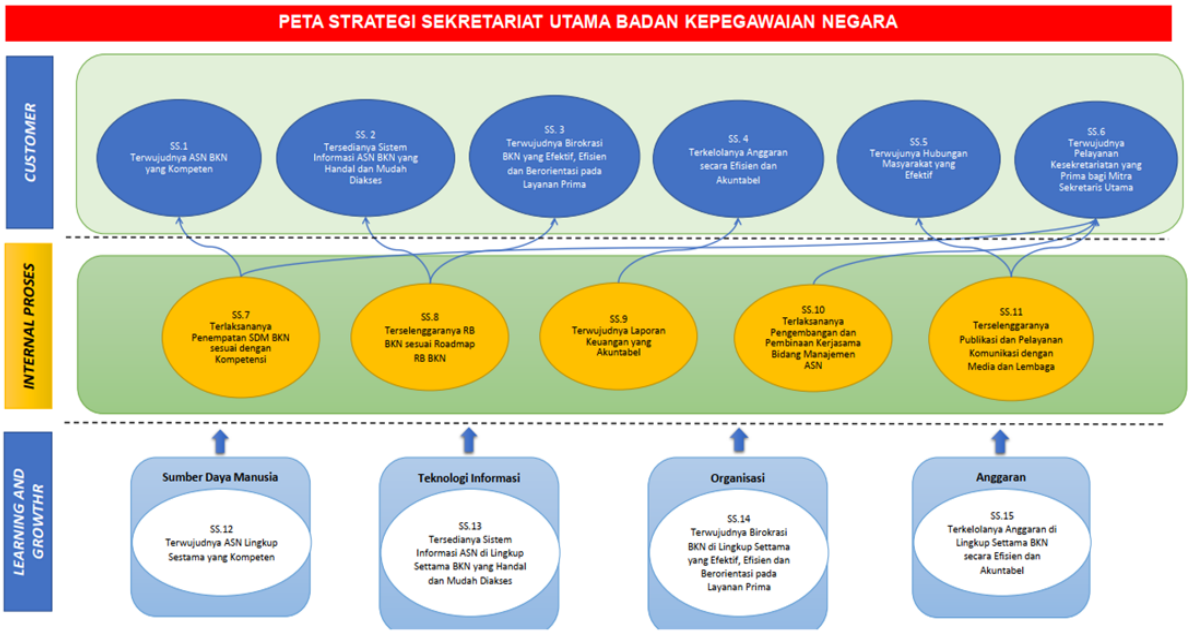

Gambar 3.2 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024
Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

1. *Customer Perspective* terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:
   e. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
   f. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses;
   g. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
   h. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel;
   i. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif;
   j. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
2. *Internal Process Perspective* merupakan proses yang harus dilakukan Sekretaris Utama untuk mencapai output dan *outcome* yang diharapkan. Terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis, sebagai berikut:
   k. Sasaran Strategis 7: Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi;

l. Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN;
m. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel;
n. Sasaran Strategis 10: Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN;
o. Sasaran Strategis 11: Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal.

3. *Learn* and *Growth Perspective*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretaris Utama BKN. Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

p. Sasaran Strategis 12: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
q. Sasaran Strategis 13: Tersedianya sistem informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
r. Sasaran Strategis 14: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
s. Sasaran Strategis 15: Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

B. Indikator dan Target Kinerja 2023

Tahun 2023 merupakan tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong transformasi ekonomi agar tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan pasca pandemi sehingga sasaran jangka menengah dan panjang Indonesia terwujud. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan juga berintegritas dimana penguatan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan publik yang baik dan memudahkan akses sumber daya manusia Indonesia menjadi bertumbuh, semakin kompetitif dan maju. Disinilah Badan Kepegawaian Negara mengambil peran untuk membuat kebijakan-kebijakan teknis yang berpihak kepada masyarakat pada umumnya dan juga kepada Aparatur Sipil Negara yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat sehingga Indonesia mampu bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara menetapkan Sasaran Rencana Kerja 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target
Customer Perspective				
1	Terwujudnya ASN BKN yang Kompeten	1	Indeks Profesional ASN BKN	80

2	Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses	2	Indeks Maturitas SPBE BKN	3,7
3	Terwujudnya Birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	3	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	83
		4	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	80
		5	Level Maturitas SPIP	4
		6	Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	380
		7	Indeks Pengelolaan Aset	3,20
		8	Indeks Tata Kelola PBJ	80,6
		9	Indeks Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	75
4	Terlaksananya Anggaran Secara efisien dan akuntabel	10	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP
		11	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	93
5	Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif	12	Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN	93
		13	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(Infor -matif) 91
6	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretariat Utama	14	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	88
Internal Process Perspective				
7	Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi	15	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	93
8	Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN	16	Persentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap per tahun	100

9	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel	17	Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088	85
10	Terlaksananya pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN	18	Persentase Dokumen Kerjasama yang disepakati	95
11	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	19	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga *Stakeholder* lainnya	98,30
Learn and Growth Perspective				
12	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten	20	Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN	81
13	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses	21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama	100
14	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN	36
		23	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara	80
15	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel	24	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	100
		25	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Settama Tahun 2023
Sumber: Perjanjian Kinerja Settama Tahun 2023

Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara menetapkan Indikator Kinerja Utama turunan dari masing-masing Sasaran Strategis yang direncanakan akan dicapai dengan target dan anggaran beserta dasar penetapat target sebagaimana tertera pada penjelasan di halaman selanjutnya.

SS. 1. Terwujudnya ASN BKN yang Kompeten
IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
70,42	78,42	N/A	78	78	80	Rp200.000.000,-

Tabel 3. 2 Rencana Target IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Sesuai dengan hal tersebut, melalui Sekretaris Utama dilakukan pengukuran dan perhitungan nilai Indeks Profesionalitas di lingkungan BKN. Pada Tahun 2022, telah dilakukan rekapitulasi sementara dan diperoleh nilai sementara Indeks Profesionalitas ASN BKN sebesar 76,18. Nilai indeks Profesionalitas ASN BKN tersebut termasuk dalam kategori "Sedang". Untuk penilaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, dimensi yang nilainya masih belum optimal adalah dimensi Kompetensi dan Kinerja. Pada dimensi Kompetensi terdapat pegawai BKN yang belum memenuhi pelatihan teknis/pengembangan kompetensi 20 JP tiap tahunnya dan belum melaksanakan Diklat sesuai dengan tingkat jabatannya. Selain itu, pada dimensi Kinerja terdapat pegawai BKN yang belum mengunggah dokumen kinerja tahun 2021 sehingga mempengaruhi perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN. Upaya yang dilakukan adalah dengan menghimbau pegawai untuk melengkapi dokumen bukti pelatihan yang pernah diikuti serta melakukan pemutakhiran nilai SKP 2021 pada SAPK sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas BKN.

Ada pun target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 80. Target tersebut sejalan dengan sejumlah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN, diantaranya adalah dengan telah diterbitkannya SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2022 terkait *Coaching*, *Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB), SE Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan magang di lingkungan BKN, serta SE Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan komunitas belajar di lingkungan BKN sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai di BKN.

Selain itu, melalui Biro SDM dilakukan kerjasama dengan Pusbangpeg ASN dalam rangka penyelenggaraan pelatihan yang belum terselesaikan dan mempermudah pegawai dalam mengakses informasi Tugas Belajar dan Penawaran Beasiswa. Lebih

lanjut, penggunaan aplikasi *Coaching, Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB) serta sistem informasi Kinerja BKN (e-kinerja.bkn.go.id) dapat menjadi upaya dalam meningkatkan nilai dari dimensi Kompetensi dan Kinerja dalam Indeks Profesionalitas ASN BKN Tahun 2023.

SS.2. Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses

IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
2,84	2,92	2,92	3,7	3,7	3.7	Rp4.300.000,-

Tabel 3.3 Rencana Target IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indeks maturitas SPBE BKN merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kategori indeks SPBE sebagai berikut:

< 1,8 : kurang
1,8 – 2,6 : cukup
2,6 – 3,5 : baik
3,5 – 4,2 : sangat baik
4,2 – 5,0 : memuaskan

Tidak terpenuhinya nilai indeks maturitas SPBE mengindikasikan ketidakpatuhan BKN terhadap Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kurang mendukung tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Pada tahun 2022, BKN sudah mengimplementasikan SPBE dan menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian indeks SPBE tahun 2021 oleh kemenpan RB. Sekalipun BKN tidak menjadi objek evaluasi pada tahun 2022, BKN melakukan evaluasi mandiri dengan membentuk tim SPBE BKN tahun 2022. Dari hasil penilaian mandiri diperoleh penilaian 3,6. Hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2022 yang sudah dijabarkan sebelumnya. Sebanyak 14 indikator telah mencapai level 5, diikuti sebanyak 3 indikator yang telah mencapai level 4. Untuk itu, pada tahun 2023 BKN optimis menetapkan target 3,7.

SS.3. Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
77,86	76,27	N/A	83	83	83	Rp88.380.000,-

Tabel 3.4 Rencana Target IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indeks pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. Makna reformasi birokrasi adalah:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan
2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Pada tahun 2023, IKU indeks reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 83. Penetapan target ini diselaraskan dengan target capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis BKN tahun 2020-2024. Penetapan target sebesar 83 ini selain mendasarkan pada target yang dipaparkan dalam rencana strategis BKN, juga mendasarkan pada hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BKN yang dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil sebesar 83,27. Hasil penilaian mandiri bisa menjadi pedoman untuk menetapkan target, meskipun capaiannya kemungkinan lebih rendah dibandingkan penilaian mandiri. Target sebesar 83 pada tahun 2023 sebenarnya termasuk jauh jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya (2022) sebesar 76,27. Namun demikian, angka 83 masih realistis sebagai target yang harus dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi BKN tahun 2022. Meskipun hasil evaluasi (LHE) belum disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, namun demikian dari hasil pemaparan ketika evaluasi dilakukan oleh evaluator eksternal (Kementerian PAN dan RB), telah terdapat beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang tercapai output dan juga beberapa yang telah memiliki dampak yang signifikan.

IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
67,33	68,05	N/A	81	81	80	Rp26.600.000,-

Tabel 3.5 Rencana Target IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil Laporan Evaluasi yang telah dikeluarkan oleh KemenPAN RB dalam periode Renstra tahun 2020-2024, skor atau nilainya mengalami tren kenaikan yang positif setiap tahunnya. Penilaian dari 5 (lima) komponen yang dimulai dari Perencanaan kinerja sampai dengan Capaian Kinerja rata-rata mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 0,72%.
Terdapat beberapa rekomendasi dari evaluator KemenPAN RB dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kerja yang harus ditindaklanjuti secara seksama dan berkelanjutan, yaitu:

1. Menyempurnakan sasaran dan indikator di tingkat pusat dengan berdasarkan pada penjenjangan kinerja yang logis;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada unit kerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunannya agar kualitas indikator kinerjanya lebih terukur, relevan dan berorientasi hasil;
3. Menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan target kinerja tahun berikutnya;

4. Memperkuat peran pimpinan, melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi kedepannya;
5. Mendorong upaya koordinasi lintas sektor atau crosscutting dengan memperhatikan aspek kolaborasi;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan memanfaatkan hasil analisis untuk perbaikan strategi kedepannya;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, memantau dan memonitoring agar rekomendasi ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti rekomendasi di atas terkait dengan target capaian tahun 2023, bahwa untuk target atas Skor hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN tahun 2023 ditetapkan sebesar 80 di bawah target Renstra yang sudah direncanakan yaitu 81 karena melihat capaian *history* realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai target Renstra tidak memungkinkan dapat dicapai pada tahun ini, dibutuhkan effort, sinergitas dan dukungan penuh dari semua pihak baik di unit kerja eselon I dan II.

IKU 5. Level Maturitas SPIP

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
3,176	3,188	N/A	N/A	4	4	-

Tabel 3.6 Rencana Target IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Berdasarkan hasil validasi Penilaian baseline atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kami menyarankan Sekretaris Utama BKN agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana tindak perbaikan penyelenggaraan SPIP terintegrasi berdasarkan hasil identifikasi Area of Improvement (AoI) yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja maupun tingkat instansi
2. Melakukan perbaikan dengan prioritas antara lain:
   a. Melakukan reviu Rencana Strategis 2020-2024 terutama untuk memperbaiki beberapa sasaran/outcome dan indikator utama atas program, beberapa output dan indikator output program, beberapa sasaran dan indikator kegiatan, serta penetapan target kinerja agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART.

b. Implementasi pedoman pelaksanaan manajemen risiko terutama untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian risiko strategis tingkat instansi dan risiko fraud serta rencana tindak pengendaliannya.
c. Melaksanakan evaluasi atas efektifitas implementasi kebijakan secara komprehensif dan berkala untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi implementasi dalam pencapaian tujuan organisasi, terutama terhadap implementasi kebijakan utama yang mendukung tugas dan fungsi organisasi.
d. Evaluasi dan pemutahiran proses bisnis sesuai dengan tujuan dan tata kerja organisasi BKN.
e. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan oleh APIP dengan berbasis risiko.

IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
332,5	332,5	339	380	380	380	Rp. 38.800.000

Tabel 3.7 Rencana Target IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BKN telah menerapkan Sistem Merit berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 dengan pelaksanaan *self-assessment*. Nilai Sistem Merit yang dikeluarkan oleh KASN pada Triwulan III yang diperoleh BKN pada tahun 2022 adalah sebesar 339 dan berhasil mempertahankan predikat "**Sangat Baik**".

Nilai Sistem Merit BKN akan dilakukan penilaian kembali pada tahun 2024, karena penilaian Sistem Merit untuk instansi dengan predikat "**Sangat Baik**" dilakukan setiap 2 tahun sekali. Namun demikian, pada tahun 2023, BKN akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap 8 (delapan) aspek dalam penilaian Sistem Merit berdasarkan rekomendasi KASN pada tahun 2022. Delapan aspek tersebut terdiri dari Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta aspek Sistem Informasi.

IKU 7. Indeks Pengelolaan Aset

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	3.01	N/A	N/A	N/A	3.20	Rp30.820.516.000,-

Tabel 3.8 Rencana Target IKU 7. Indeks Pengelolaan Aset
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Sekretariat Utama secara resmi menggunakan Indeks Pengelolaan Aset sebagai acuan penilaian kualitas pengelolaan aset yang ada di BKN. Indikator kinerja pengelolaan BMN atau yang dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (Direktorat PKKN) DJKN sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah dimulai pengukurannya sejak tahun 2021. Hal ini menyebabkan BKN belum mendapatkan nilai realisasi pada tahun 2020. Implementasi IPA merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara sebagai upaya pengelolaan barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola Barang Milik Negara karena telah ada alat ukurnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KM.6/2022 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif
   a. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP terkait BMN pada K/L (5%);
   b. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Pengelolaan Aset (15%);
2. Sasaran Strategis II : Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
   a. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) (10%);
   b. Asuransi BMN (15%);
3. Sasaran Strategis III : Pengawasan Pengendalian yang Efektif
   a. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (15%);
   b. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%);
4. Sasaran Strategis IV : Administrasi BMN yang Handal
   a. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%);
   b. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (10%).

Ada pun target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 3.04 (BAIK), dimana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Kepegawaian Negara karena pada tahun 2021 BKN sudah berhasil meraih nilai indeks pengelolaan aset 3.01 dengan predikat **BAIK**.

IKU 8. Indeks Tata Kelola PBJ

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
88	68.11	N/A	N/A	N/A	80.6	Rp457.226.000,-

Tabel 3.9 Rencana Target IKU 8. Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP. Indeks tata kelola PBJ terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat); *E-Purchasing*; *Non-E-Tendering* & *Non-E-Purchasing*; dan *E-Kontrak*.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Tahun 2021, BKN mendapatkan nilai 68.11. Perolehan nilai tersebut tidak bisa lepas dari fakta bahwa sejak tahun 2021, tingkat maturitas UKPBJ Badan Kepegawaian Negara berada di level 3 (proaktif). Dimana pada level ini, UKPBJ berada pada kondisi ideal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya. Lebih lanjut, pencapaian level proaktif oleh UKPBJ diartikan bahwa UKPBJ telah fokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). Upaya pencapaian dilakukan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Adapun perolehan nilai e-purchasing pada tahun 2021 masih berada di bawah rata-rata K/L/Pemda dan akan menjadi fokus perbaikan. Hal ini dituangkan menjadi aksi reformasi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu dengan cara mensosialisasikan dan memaksimalkan penggunaan Katalog Sektoral di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, baik di lingkup kantor pusat, regional, maupun UPT.

IKU 9. Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
61,3	60,4	N/A	N/A	N/A	75	Rp1.377.590.000,-

Tabel 3.10 Rencana Target IKU 9. Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Realisasi hasil audit kearsipan dari ANRI Tahun 2021 memperoleh nilai 60.4 dan mendapat predikat **Baik** (B). Beberapa kegiatan terkait kearsipan sudah dilaksanakan antara lain sudah tersusunnya Instruksi Kepala BKN terkait kearsipan dan petunjuk teknis penggunaan, buku panduan penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BKN, melakukan penyerahan arsip inaktif dan arsip statis ke unit kearsipan, pemusnahan arsip ke ANRI pada September 2022, melakukan pengawasan kearsipan internal, serta melakukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Fokus perbaikan di tahun 2023 adalah dengan mengikutsertakan pegawai Biro Umum dalam diklat kearsipan, menyusun pedoman kearsipan, melakukan pengawasan kearsipan internal ke Kantor Regional BKN dan UPT BKN dengan target tahun 2023 nilai hasil audit kearsipan meningkat menjadi 75.

SS.4. Terlaksananya Anggaran secara Efisien dan Akuntabel
IKU 10. Opini atas Laporan Keuangan BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Rp. 100.000.000,-

Tabel 3.11 Rencana Target IKU 10. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Opini Audit Laporan Keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti hal nya dengan risiko kesalahan (penyimpangan), dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut:

1. Laporan keuangan lengkap.
2. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap.
3. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.
5. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (*going concern*).

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI didapatkan opini/pendapat sebagai pernyataan profesional pemeriksa keuangan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pentingnya opini BPK RI atas Laporan Keuangan Instansi melatarbelakangi opini BPK RI menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara dengan target WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, dan WTP menjadi target Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2023.

IKU 11. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Setama	Renja Sestama	
87,84	91,74	90.19	N/A	86	93	Rp. 35.700.000,-

Tabel 3.12 Rencana Target IKU 11. Nilai Predikat IKPA Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. Pengukuran IKPA meliputi 3 (tiga) aspek, yakni Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Adapun elemen pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Deviasi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan anggaran
4. Belanja Kontraktual, menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).

5. Penyelesaian Tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal di-*revolving* satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran

Monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Kuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan oleh Sekretariat Utama pada tahun 2022 sebagai sarana untuk berbenah agar dapat terus meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuasian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang sesuai dengan elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja dan mempengaruhi nilai IKPA sebesar 93,54 dari nilai 84 yang ditargetkan. Nilai ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2021 dengan target 82 memperoleh realisasi sebesar 89,94. Oleh karena itu untuk target pada IKU, Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 93 berdasarkan capaian realisasi di tahun 2022

SS.5. Terwujudnya Hubungan Masyarakat yang Efektif
IKU 12. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	Rp124.583.000,-

Tabel 3.13 Rencana Target IKU 12. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Berdasarkan hasil monitoring pemberitaan BKN tahun 2022 terdapat 2.265 berita dengan isu yang banyak diberitakan antara lain Pelaksanaan PPPK dan Penyelesaian Tenaga Honorer. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana juga menjadi *top person* pemberitaan BKN yang membahas permasalahan terkait Pendataan Non-ASN dan Penyelenggaraan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan yang tidak dilaksanakan secara serentak. Persentase pemberitaan baik media berdasarkan *news content* dan *news title* adalah sebesar 82,5% dan 82,3%. Sehingga realisasi indikator kinerja utama ini adalah rata-rata dari *news content* dan *news title*. Pada tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 82,3%. Pemberitaan bernilai positif yang diperoleh BKN bergantung pada penerimaan *audience*. Penerimaan *Audience* BKN atas pemberitaan yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2022 ini cenderung negatif sehingga persentasenya menurun. Hal ini disebabkan oleh isu pengunduran diri PNS. Isu ini sangat berpengaruh terhadap perolehan perspektif baik pada pemberitaan BKN. Isu ini bertahan selama lebih kurang 2 (dua) bulan sehingga berpengaruh cukup besar pada persentase pemberitaan nilai positif BKN. Pemberitaan BKN bernilai positif kembali meningkat pada saat BKN mengeluarkan isu terkait penyederhanaan layanan kepegawaian, namun isu tersebut masih belum dapat mengungkit persentase pemberitaan baik dikarenakan masih banyaknya ASN yang menjadi "konsumen" BKN yang masih merasa sulit dalam memperoleh pelayanan kepegawaian.

Pada IKU tahun 2022 adalah persentase pemberitaan baik tentang BKN di media online berubah menjadi persentase capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN.
Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemberitaan baik itu tidak bisa di prediksi dan bisa menjadi pemberitaan yang tidak baik tergantung situasi yang sedang terjadi di masyarakat dan menilai berdasarkan persoalan yang sedang ramai dibicarakan (trending). Sementara itu jika menilai berdasarkan rerata jangkauan publikasi maka akan berfokus untuk mengangkat isu atau topik yang sedang ramai dibicarakan secara lebih luas. Meskipun begitu tidak menjadi halangan bagi sekretaris utama untuk mencapai sasaran strategisnya. Untuk mendukung dan meningkatkan ketercapaian IKU Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN, maka terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. meningkatkan klarifikasi atas pemberitaan yang telah beredar baik melalui konferensi

pers atau menerbitkan siaran pers dan berita;

2. membangun kerja sama dengan berbagai media baik media *online* maupun media massa sebagai mitra komunikasi publik BKN.
3. BKN menyiapkan strategi komunikasi yang menargetkan narasi utama yakni Satu Data ASN dikenal secara luas oleh public melalui Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama. BHHK juga menyiapkan narasi pendamping yang disesuaikan dengan momentum atau isu incidental pemerintah secara umum.

Penetapan target sebesar 94% berdasarkan penilaian bahwa nilai tersebut akan lebih mungkin dicapai dengan analisa kalau menjangkau publikasi media BKN akan lebih luas tanpa harus menyaring pemberitaan. Maksudnya disini berita yang dibahas atau diangkat tetap bisa mengikuti trend dimasyarakat.

IKU 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
69,12	73,13	N/A	N/A	N/A	91	Rp64.950.000,-

Tabel 3.14 Rencana Target IKU 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, realisasi keterbukaan informasi publik Badan Kepegawaian Negara berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh komisi informasi pusat adalah sebesar 90,93. Pada tahun 2022, BKN telah menyelenggarakan layanan permohonan informasi melalui PPID sebanyak 13 permohonan informasi. Penilaian keterbukaan informasi publik diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Progres yang telah dilakukan yaitu penyerahan dokumen seperti rekapitulasi kegiatan penyelenggaraan KIP BKN dan laporan PPID, saat ini sedang dalam tahap verifikasi oleh KIP. yang menjadi kendala adalah Penyelenggara kompetisi penilaian keterbukaan informasi dilakukan oleh instansi lain. Solusi yang direkomendasikan yaitu Mempersiapkan dokumen evidence monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara optimal

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian IKU nilai keterbukaan informasi publik 2023, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya melakukan publikasi LHKPN Pimpinan Tinggi pada website BKN, menyusun daftar informasi yang telah habis jangka pengecualiannya, dan membuat aplikasi terkait dengan layanan informasi.
Melalui Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, BKN akan mengembangkan website PPID dan aplikasi permohonan informasi secara online sehingga memudahkan *stakeholder* untuk memperoleh informasi public yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut dapat menjadi pengungkit meningkatkan nilai indeks keterbukaan informasi publik BKN dibandingkan Tahun sebelumnya. 3 variabel tersebut berkontribusi

sebanyak 1% terhadap nilai keseluruhan, dengan demikian penetapan atau target capaian sebesar 91 merupakan target yang memungkinkan untuk dicapai dengan berbagai pertimbangan variabel yang telah ditetapkan, tapi berharap nilai indeks yang di realisasi bisa melebihi target yang ditetapkan. Penetapan target 91 karena pada realisasi 2022 sebesar 90,93 maka dari perlu menaikan angka target.

SS.6.Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima Bagi Mitra Sekretariat Utama

IKU 14. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
81,49	84,01	87,56	88	88	88	Rp7.500.000,-

Tabel 3.15 Rencana Target IKU 14. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Perhitungan berdasarkan Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah periode TW III (*evidence* terlampir). Nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan TW I (75), TW II (87,76) dan TW III 87,56 yang menjadi kendala adalah Sebaran responden yang kurang merata. Solusi yang direkomendasikan adalah Peningkatan pelayanan kepegawaian.

Pada tahun 2023, BKN berkomitmen secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan peningkatan layanan dalam rangka memenuhi ekspektasi stakeholder BKN. Perbaikan yang direncanakan BKN untuk meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Meninjau standar pelayanan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama;
2. Meningkatkan kecakapan pegawai dalam berkoordinasi dan menanggapi *feedback* dari unit kerja.

Bersama dengan itu, setiap biro yang berada di bawah Sekretariat Utama terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan demi tercapainya kepuasan pelayanan yang dibutuhkan baik bagi *customer* maupun *stakeholder*. Penetapan target angka sebesar 88 pada tahun 2023 diberikan karena pada TW III Tahun 2022 Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama yang direalisasikan adalah sebesar 87,56 dan diproyeksikan angkanya berada kisaran itu pada realisasi Tahunan .

SS.7. Terlaksananya Penempatan SDM BKN Sesuai Dengan Kompetensi
IKU 15. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
80%	91%	N/A	N/A	93%	93%	Rp717.540.000,-

Tabel 3.16 Rencana Target IKU 15. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Realisasi yang dicapai untuk IKU persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya pada Tahun 2021 adalah sebesar 91% dari target yang ditetapkan sebesar 91%. Untuk Tahun 2022 sampai dengan TW III, belum didapat capaian akhir dari IKU ini. Dalam mengukur capaian indikator penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi digunakan data yang diperoleh dari Sistem Manajemen Talenta BKN, dimana manajemen talenta merupakan aktivitas terintegrasi dalam mengelola SDM melalui proses mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, mempertahankan dan menyebarkan orang-orang bertalenta tinggi ke dalam suatu jabatan di organisasi secara tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki individu SDM tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta di lingkungan BKN, sampai dengan TW III Tahun 2022 telah disusun Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA ASN BKN) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan dan mengembangkan pegawai-pegawai agar didapatkan talenta-talenta terbaik yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi.

Dalam melakukan perhitungan persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi menggunakan Sistem Manajemen Talenta, mulai tahun 2022 disusun *milestone* setiap tahunnya untuk kluster pegawai yang diidentifikasi, yaitu pada tahun 2022 dilakukan perhitungan untuk Jabatan JFT Madya dan Administrator (123 pegawai), tahun 2023 untuk Jabatan JFT Muda dan Pengawas (607 pegawai), tahun 2024 untuk JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama (86 pegawai) serta JFT Pertama, JF Keterampilan dan JF Pelaksana (1579 pegawai).

Pada tahun 2023, target yang ingin dicapai sebesar 93% sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Utama. Selain itu, target tersebut telah disesuaikan dengan perhitungan klaster pegawai yang diidentifikasi pada tahun 2023, yaitu hanya untuk Jabatan JFT Muda dan Pengawas sebanyak 607 pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, formula perhitungan IKU pada tahun 2023 juga mengalami penyesuaian dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022, formula untuk IKU ini adalah dengan

menghitung kesesuaian pada kluster pegawai di Jabatan JFT Madya dan Administrator, maka untuk tahun 2023 hanya untuk Jabatan JFT Muda dan Pengawas yang dilihat kesesuaian antara riwayat potensi, kinerja dan kompetensi dengan penempatan pegawai berdasarkan data dari aplikasi Manajemen Talenta (MATA ASN).

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya target IKU persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya yang akan dilakukan pada tahun 2023, diantaranya adalah penyempurnaan Sistem Manajemen Talenta, Membuat pedoman penyusunan Pola Karier, Menyusun pedoman *Human Capital Development Plan* 2022-2026, dan Mengimplementasikan pengukuran *Job Fit* untuk setiap seleksi baik dalam proses rekrutmen CPNS maupun dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

SS.8. Terselenggaranya RB BKN sesuai Roadmap RB BKN

IKU 16. Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Roadmap RB per Tahun

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstras Sestama	Renja Sestama	
100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	Rp. 5.250.000,-

Tabel 3.17 Rencana Target IKU 16. Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Roadmap RB Per Tahun Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Program kegiatan RB di BKN tahun 2022 dilaksanakan dengan mendasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 yang telah disusun kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun oleh setiap kelompok kerja area perubahan. Berdasarkan hal tersebut tingkat pelaksanaan RATL RB pada tahun 2022 sudah tercapai 100%. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pada IKU ini, pada tahun 2023 salah satu kegiatan yang direncanakan adalah terselenggaranya *review roadmap* RB BKN.

SS.9. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel
IKU 17. Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
-	-	73,39%	N/A	N/A	85	Rp262.900.000,-

Tabel 3.18 Rencana Target IKU 17. Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088 Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Laporan Keuangan BKN (BA 088) terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, antara lain:

1. Persentase Rekonsiliasi 16 Satuan Kerja BKN secara andal, perhitungan komponen ini adalah dengan mengukur kesesuaian tanggal pada Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Satuan Kerja dalam menyelesaikan kewajiban rekonsiliasi eksternal bulanan dengan Open Period yang telah ditentukan oleh Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementeriann Keuangan;
2. Persentase Pengumpulan Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (BKN BA 088) secara lengkap, perhitungan komponen ini adalah dengan mengukur kesesuaian tanggal upload Laporan Keuangan secara lengkap yang disampaikan oleh 16 Satuan Kerja. Laporan Keuangan Satuan Kerja dikatakan lengkap jika memuat Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
3. Persentase Pengumpulan Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada 16 Satuan Kerja secara lengkap, perhitungan komponen ini adalah dengan mengukur kesesuaian tanggal upload Laporan Penilaian PIPK secara lengkap yang disampaikan oleh 16 Satuan Kerja. Laporan PIPK Satuan Kerja dikatakan lengkap jika memuat Laporan Hasil Penilaian PIPK (Halaman 88-89 PMK No. 17/PMK.09/2019); Kertas Kerja PIPK (Tabel A, (A1 Jika Ada), B1, B2, C1, C2, D); Dokumen Pendukung Kertas Kerja Tabel B1, dan C1; Dokumentasi selama proses penilaian (Proses Rapat, Proses Wawancara, Proses Survei/Kuesioner, Observasi).

Proyeksi realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 84.59% dari target 80% yang telah ditetapkan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan target kinerja di tahun 2023 yaitu sebesar 85% dari dasar capaian realisasi di tahun 2022. Dengan langkah meningkatkan monitoring secara berkala dan pembinaan mendalam pada sumber daya penyusun laporan keuangan satuan kerja, tim penilai PIPK satuan kerja, penyelenggaraan workshop Laporan Keuangan, dan sosialisasi tentang pemahaman mendasar Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satuan kerja.

SS.10. Terlaksananya Pembinaan Kerjasama Bidang Manajemen ASN
IKU 18. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
94%	85%	100%	N/A	92%	95%	Rp200.000.000,-

Tabel 3.19 Rencana Target IKU 18. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Jumlah permohonan kerja sama yang diterima di TW III sebesar:
1. Kerja sama dalam negeri: 45
2. Kerja sama luar negeri: 48

Jumlah permohonan kerjasama yang ditindaklanjuti:
1. Kerja sama dalam negeri: 45
2. Kerja sama luar negeri: 48

Pada dasarnya, seluruh pengajuan kerja sama luar negeri diterima dan ditindaklanjuti. Namun, beberapa penawaran pelatihan tidak sesuai dengan tusi BKN. Oleh karena itu, proses tindak lanjut tidak sampai pada pengiriman delegasi.

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian persentase jumlah dokumen kerja sama yang disepakati pada tahun 2023, BKN akan menindaklanjuti pembangunan Aplikasi Kerja Sama (SIKERMA) hingga sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis kerja sama dalam dan luar negeri. Setelah melihat dan menimbang maka realisasi pada Tahun 2022 kami proyeksikan sebesar 94% sehingga pada Tahun 2023 kami tetapkan target sebesar 95%

SS.11. Terselenggaranya Publikasi dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal
IKU 19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga *Stakeholder* Lainnya

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
98,2	93	89	N/A	96	98,3	Rp124.583.000,-

Tabel 3.20 Rencana Target IKU 19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Sampai dengan triwulan III, Program dan kegiatan BKN di publikasikan melalui media Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube, dan Website sejumlah 659 unggahan. yang menjadi kendala adalah :

1. Belum adanya parameter publikasi dan agenda kegiatan tahunan,
2. Sulit untuk mendapatkan informasi dari unit kerja terkait program dan kegiatan untuk dipublikasikan serta beberapa unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan secara bersamaan.

Pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama berkomitmen untuk mendukung dan meningkatkan capaian IKU, salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi sehingga persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN dapat tercapai. Setelah menimbang dan menghitung capaian sampe TW III, kami memproyeksikan realisasi 2022 sebesar 96, sehingga target pada Tahun 2023 kami tetapkan sebesar 98,3

SS.12. Terwujudnya ASN di Lingkup Settama BKN yang Kompeten IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
67,77	76,13	68,02	N/A	81	81	-

Tabel 3.21 Rencana Target IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, nilai rata-rata sementara Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 68,02 dengan rincian nilai sementara Indeks Profesionalitas Biro Umum 54,96, Biro Perencanaan dan Organisasi 73,95, Biro Keuangan 73,77 dan Biro Sumber Daya Manusia 69,43. Adapun hasil sementara Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama yang berkategori rendah dikarenakan terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti data sertifikat pelatihan maupun nilai kinerja tahun 2021.

Untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama tidak terdapat anggaran khusus yang dialokasikan. Namun, dalam rangka meningkatkan nilai IP Sekretariat Utama, maka akan terus dilakukan *update* secara berkala untuk setiap pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan pegawai pada tahun 2021-2022 maupun pemutakhiran nilai kinerja tahun 2021 pada SIASN. Selain itu, di tahun 2023, seluruh unit di bawah Sekretariat Utama diharapkan mulai melakukan implementasi Aplikasi CMB (*Coaching*, *Mentoring* dan Belajar Mandiri) serta Komunitas Belajar sejalan dengan target Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama yang naik menjadi 81 pada tahun 2023.

SS.13. Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang Handal dan Mudah diakses

IKU 21. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp200.000.000,-

Tabel 3.22 Rencana Target IKU 21. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Saat ini seluruh kegiatan dalam pemerintahan baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan sedang disusun dengan mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar unit kerja dalam melaksanakan urusan dan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Adapun daftar aplikasi yang tersedia di lingkup Sekretariat Utama bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

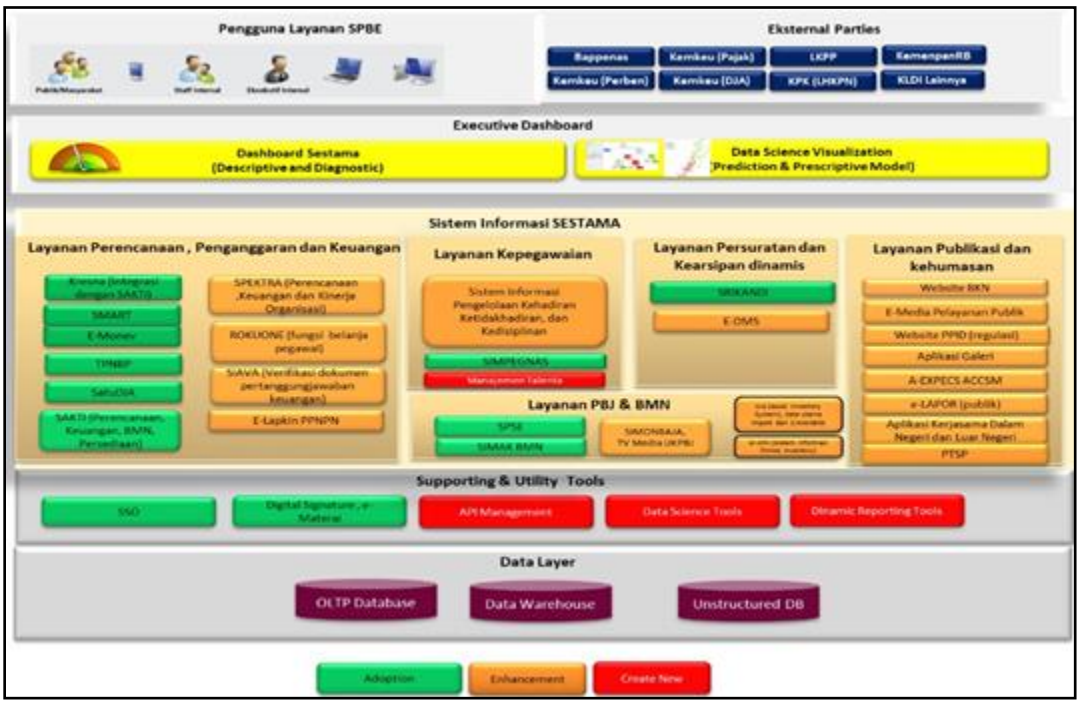

Gambar 3.3 Sistem Informasi Sekretaris Utama BKN
Sumber: Sistem Informasi Sekretaris Utama BKN

Target di tahun 2023 adalah seluruh aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan maksimal oleh seluruh pegawai sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing aplikasi. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan penggunaan Sistem Informasi yang handal adalah dengan sosialisasi secara berkala dan *maintenance* rutin sistem aplikasinya sehingga minim terjadi kerusakan atau *error* saat digunakan.

SS.14. Terwujudnya Birokrasi BKN di lingkup Settama yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima
IKU 22. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
34,54	34,54	32,39	N/A	36	36	Rp. 49.050.000,-

Tabel 3.23 Rencana Target IKU 22. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Utama BKN. Sampai dengan TW III tahun 2022, hasil penilaian oleh tim penilai internal sebesar 32,39.

Aspek	Bobot	Sub Komponen
Pemenuhan	14,6	• Manajemen Perubahan (2) • Deregulasi Kebijakan (0,75) • Penataan dan Penguatan Organisasi (2) • Penataan Tata Laksana (1) • Pentaan Sistem Manajemen SDM (1,4) • Penguatan Akuntabilitas (2,5) • Penguatan Pengawasan (2,1) • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,39) Total aspek pemenuhan = 14,14
Reform	21,7	• Manajemen Perubahan (1,9) • Deregulasi Kebijakan (1,5) • Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5) • Penataan Tata Laksana (3,75) • Penataan Sistem Manajemen SDM (1,94) • Penguatan Akuntabilitas (1,97) • Penguatan Pengawasan (1,93) • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,74) Total aspek reform = 18,25
Total	**36,3**	**32.39**

Pada tahun 2023 untuk mencapai target yang ditentukan, Sekretariat Utama akan melakukan tindak lanjut atas hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal. Selanjutnya agar Rencana Aksi RB dapat berjalan secara optimal, Indikator Kinerja ini akan diturunkan ke masing - masing unit kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Utama. Selain itu, tiap unit di Eselon II juga membentuk tim RB masing – masing.

IKU 23. Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
71,96	73,95	72,55	N/A	85	80	-

Tabel 3. 24 Rencana Target IKU 23. Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Settama BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Sampai dengan TW III tahun 2022 LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat menunjukan bahwa Sekretaris Utama memperoleh nilai sebesar 72,55 (tujuh puluh dua koma lima puluh lima) atau predikat BB (Sangat Baik). Hasil penilaian tersebut dapat diartikan bahwa AKIP sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem kinerja yang andal.

Berdasarkan penilaian tersebut, terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan AKIP di lingkup Settama. Salah satunya adalah terkait adanya target di renstra yang dinilai tidak *achievable*. Sebagai upaya tindak lanjut, unit kerja di lingkup Sekretariat Utama melakukan *review* atas target yang ada dalam renstra, hasilnya adalah terdapat perubahan target indikator kinerja (IKU) pada tahun 2023, termasuk perubahan target dalam IKU ini yang semula 85 (sama dengan Renstra) menjadi 80.

1. Melakukan review Renstra Sekretariat Utama 2020 - 2024 sebagai dasar penyusunan Renstra Sekretariat Utama periode 2025 -2029;
2. Memastikan dokumen perencanaan kinerja terpenuhi dengan baik, melakukan review dan perbaikan pada dokumen Manual IKU, Renja, Penetapan Target IKU, dan Rencana Aksi serta memperhatikan kesesuaiannya dengan Renstra dan PK
3. Menertibkan administrasi dokumen pendukung kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di lingkup Sekretariat Utama;
4. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan analisis secara mendalam atas setiap capaian indikator kinerja, terutama perlunya penjelasan mengenai hambatan dalam realisasi capaian indikator kinerja dan penjelasan mengenai rekomendasi perbaikannya;
5. Penyusunan dokumen Laporan Kinerja harus dilengkapi dengan data yang andal sesuai dengan formula yang tercantum dalam dokumen manual IKU, serta membuat Laporan Kinerja dengan analisis yang mendalam agar dapat dijadikan bahan/informasi dalam proses penyusunan perencanaan kinerja;
6. Pemanfaatan Google Data Studio (aplikasi MAKO) dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data dan dokumen pendukung kinerja organisasi perlu ditingkatkan fitur dan kualitasnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah

dengan disusunnya sistem informasi yang dapat mengakomodir proses pelaksanaan SAKIP di lingkup BKN.

SS.15. Terkelolanya Anggaran di Lingkup Settama BKN secara Efisien dan Akuntabel

IKU 24. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
98,86%	90,58%	64,94%	N/A	100%	100%	Rp. 262.581.684.000,-

Tabel 3.25 Rencana Target IKU 24. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN mengukur seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Sekretariat Utama dengan membandingkan perencanaan anggaran dan fisik yang sudah disusun. Sekretariat Utama dalam DIPA tahun 2023 memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp. 262.581.684.000, anggaran tersebut untuk membiayai 1 Program dan 4 Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Sekretariat Utama BKN. Untuk Tahun 2023, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN menargetkan 100%.

IKU 25. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Realisasi			Target 2023			Anggaran 2023
2020	2021	s.d Tw III 2022	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Rp20.400.000

Tabel 3. 26 Rencana Target IKU 25. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2023
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Indikator ini untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan/audit terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama. Pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan diwujudkan dengan tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Tujuannya adalah kepatuhan unit kerja atas tindak lanjut atau rekomendasi BPK/Inspektorat.

C. Program *Reform* 2023

Reform pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Adapun target *Reform* Sekretariat Utama pada tahun 2023, yaitu:

***Reform* 1. Optimalisasi Implementasi *Coaching, Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB), Magang serta Komunitas Belajar untuk Peningkatan Kompetensi SDM di Lingkungan BKN.**

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai di BKN, Biro SDM telah menerbitkan SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2022 terkait *Coaching, Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB), SE Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan magang di lingkungan BKN, serta SE Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan komunitas belajar di lingkungan BKN dan telah membangung aplikasi *Coaching, Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB). Pada tahun 2023 Biro SDM akan menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi CMB tersebut serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dari surat edaran-surat edaran yang diterbitkan tersebut. Aplikasi CMB juga akan dilengkapi dengan adanya aplikasi Komunitas Belajar di dalamnya yang kedepan akan diintegrasikan menjadi Aplikasi Pengembangan Kompetensi. Selain itu, Biro SDM sedang menyusun Training Need Analysis untuk melihat kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh pegawai BKN demi meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

***Reform* 2. Optimalisasi Kolaborasi dengan Pusbangpeg ASN dalam Penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Fungsional, dan Teknis**

Biro SDM akan mengusulkan pelaksanaan beberapa pelatihan prioritas yang mana apabila pelatihan tersebut di luar core tugas dan fungsi Pusbangpeg akan difasilitasi oleh Pusbang penyelenggaraannya dengan bekerjasama dengan vendor pelatihan atau instansi terkait yang membidangi pelatihan tersebut misalnya seperti pelatihan *Risk Management* (CMRO dan CRMP) sehingga pegawai dapat mengembangkan kompetensi diri yang tidak hanya berkaitan dengan kepegawaian. Pelatihan-pelatihan prioritas tersebut diantaranya:

1. Usulan Pelatihan Tahun 2023 (prioritas 1) antara lain:
    a. *Communication Skill*
    b. *Legal Drafting* dan *Writing*

c. Manajemen Talenta
d. Pelatihan Critical Thinking
e. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
f. Pelatihan Konseling Karir dan Kinerja
g. Pelatihan Penyusunan Alat Potensi
h. Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

2. Usulan Pelatihan Tahun 2023 (prioritas 2) antara lain:
   a. Bimtek Pengelolaan Arsip Inaktif
   b. Bimtek Penyusunan Program Kegiatan, Penyusunan Rencana Strategis
   c. Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat dan Kesenjangan Kompetensi
   d. Pelatihan Auditor Hukum
   e. Pelatihan Digitalisasi Arsip
   f. Pelatihan *People Resilience*
   g. Pelatihan *Service Excellent*
   h. Pelatihan *Virtual Assessment Center*
   i. *Workshop* Pengembangan Soal Berbasis HOTS.

Pelatihan dengan status masih diblokir akan ditelaah kembali oleh Pusbangpeg ASN dan diajukan kembali untuk dibuka pemblokirannya. Pelatihan yang akan diajukan kembali antara lain Pelatihan Konseling Karir dan Kinerja, Pelatihan Manajemen Resiko, serta Orientasi PPPK. Kebutuhan internal seperti pelatihan Konseling Karir dan Kinerja (status masih diblokir), jadwal dan materi masih bisa disesuaikan. Akan tetapi, Pusbangpeg ASN membutuhkan butir kegiatan Jabatan Konselor tersebut agar dapat disusun modul pembelajarannya.

Pusbangpeg ASN diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau Universitas Indonesia (UI) untuk kebutuhan Pelatihan Advokasi bagi pegawai dengan jabatan Analis Hukum. Harapan dari Pelatihan tersebut adalah sertifikat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

***Reform* 3. Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK**

Penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK (ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) telah dilakukan dengan menerbitkan dan mensosialisasikan SE Nomor 14 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan BKN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, mencetak buku saku Panduan Perilaku Core Values Badan Kepegawaian Negara dalam jumlah terbatas dan menginternalisasikan Core Values ASN BerAKHLAK melalui Quiz dua pekanaan setelah apel oleh agen

perubahan BKN. Kedepan untuk lebih menginternalisasi nilai-nilai ini akan dibuat banner-banner yang memotivasi pegawai untuk mengimplementasikan nilai-nilai core values ini dan diharapkan setiap unit organisasi melakukan morning briefing dengan membacakan poin-poin perwujudan perilaku core values ASN BerAKHLAK Insan BKN dan memberikan contoh perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari.

***Reform* 4. Implementasi SI MATA ASN di Lingkungan BKN dalam Mendukung Sistem Merit**

Aplikasi SI MATA ASN (Sistem Informasi Manajemen Talenta) dibangun untuk mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan dan juga mengembangkan pegawai-pegawai agar didapatkan talenta-talenta terbaik yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan memetakan rencana suksesi pegawai berdasarkan potensi pegawai, kinerja yang terdiri dari penilaian SKP dan kompleksitas pekerjaan, serta kompetensi yang terdiri dari kompetensi manajerial dan sosio kultural, kompetensi teknis, dan kualifikasi. Pengimplementasian aplikasi SI MATA ASN dapat mendukung terimplementasinya sistem merit yang lebih baik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sehingga kedepan pengembangan aplikasi SI MATA ASN akan terus dilakukan.

Reform* 5. Transformasi Penyelesaian Tagihan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Digital melalui *E-Verif

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara N0. 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara pasal 15 menyatakan bahwa Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKN Pusat dan Pembinaan Keuangan pada BKN Pusat, dan Kantor Regional. Salah satu fungsi Biro Keuangan adalah melaksanakan verifikasi dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan. Keseluruhan proses ini menggunakan system yang bersifat konvensional dimana dokumen fisik menjadi dokumen yang wajib disampaikan melalui Biro Keuangan. Dokumen fisik tentunya juga memerlukan tempat yang memadai sehingga dalam proses pekerjaan sering mengganggu dalam penataan dan keamanan dokumen itu sendiri. Dengan pola kerja sekarang yang berbasis open space, penumpukan dokumen fisik sudah tidak relevan lagi dalam manajemen kantor yang modern.

Terkait dengan permasalahan yang cukup *urgent* yang sedang dan akan dihadapi terhadap proses penyelesaian tagihan keuangan di Badan Kepegawaian Negara, adalah meliputi:

1. Kecepatan Layanan

   a. Dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan masih dokumen fisik yang diantar dari unit kerja ke Biro Keuangan
   b. Kegiatan Verifikasi harus dilakukan di kantor (satu tempat)
   c. Pemilihan atau Distribusi tugas masih memerlukan waktu

d. Dalam proses verifikasi masih memerlukan waktu karena menggunakan dokumen fisik.
e. Belum dapat mengukur tingkat keterlambatan dari pengajuan dokumen terhadap standar waktu penyampaian dokumen tagihan
f. Penyampaian hasil verifikasi yang dikembalikan (dokumen) tidak dapat langsung terdistribusi ke unit yang mengajukan dokumen tagihan

2. Ketertiban

a. Masih kurang tertibnya pengajuan Dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan dengan waktu yang distandarkan
b. Masih belum tertibnya proses dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan
c. Masih rendahnya SDM pengelola keuangan dalam menindaklanjuti hasil verifikasi
d. Belum tertibnya pengelolaan arsip digital dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sistematis

3. Kepatuhan terhadap peraturan

a. Masih adanya pengajuan Dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. Susunan dokumen tagihan belum sesuai dengan tata urutan yang sudah ada dalam persyaratan

4. Ergonomi

a. Masih kurangnya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja karena banyak dokumen menumpuk di meja kerja
b. Masih memerlukan ruang/space untuk penyimpanan dokumen
c. Masih memerlukan peralatan/alat/media fisik untuk penerimaan pendistribusian dokumen
d. Masih adanya dokumen yang tercecer atau hilang pada saat proses pengajuan dokumen tagihan
e. Dengan penumpukan dokumen akan Mempengaruhi tingkat Kesehatan dalam bekerja
f. Kurangnya penampilan display tempat bekerja yang kurang dari aspek estetika

Dari permasalahan tersebut, dalam Pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur layanan kepada publik yang secara transparan dan akuntabel juga dipertanggungjawabkan, perlu adanya perubahan-perubahan yang didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan mentransformasi system penyelesaian tagihan keuangan yang bersifat konvensional (analog) ke basis digital (digitalisasi) dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pertanggungjawaban keuangan.

Transformasi penyelesaian tagihan dan pertanggungjawaban keuangan dari SIAVA menjadi E-Verifikasi yang interkoneksi dengan SAKTI dan diimplementasikan di Satker BKN Kantor Pusat. Dokumen Tagihan disampaikan secara paperless.

E-Verifikasi merupakan sistem aplikasi yang didesain untuk dapat mentransformasi terhadap proses pelaksanaan penyelesaian tagihan dan pertanggungjawaban keuangan dari yang bersifat konvensional (dokumen fisik) ke berbasis digital. Manfaat E-Verifikasi ini dapat **mempercepat** proses tagihan keuangan, **Efisien** (tidak ada tumpukan kertas yang memerlukan tempat), **terkendali** karena dapat dimonitor secara langsung oleh para pengelola keuangan termasuk PPK, Bendahara dan PPSPM serta dapat memudahkan dalam penyajian.

E-Verifikasi bekerja secara terintegrasi dengan aplikasi Sakti dalam hal penginputan SPP pada saat pengajuan dokumen tagihan dan SPM pada saat pembuatan SPM oleh PPSPM . Selain itu, E-Verifikasi juga terintegrasi dengan aplikasi Spektra dalam hal SP2D yang bisa diakses bagi pengaudit saat melakukan audit dokumen pertanggungjawaban keuangan oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

ARSITEKTUR E-VERIFIKASI

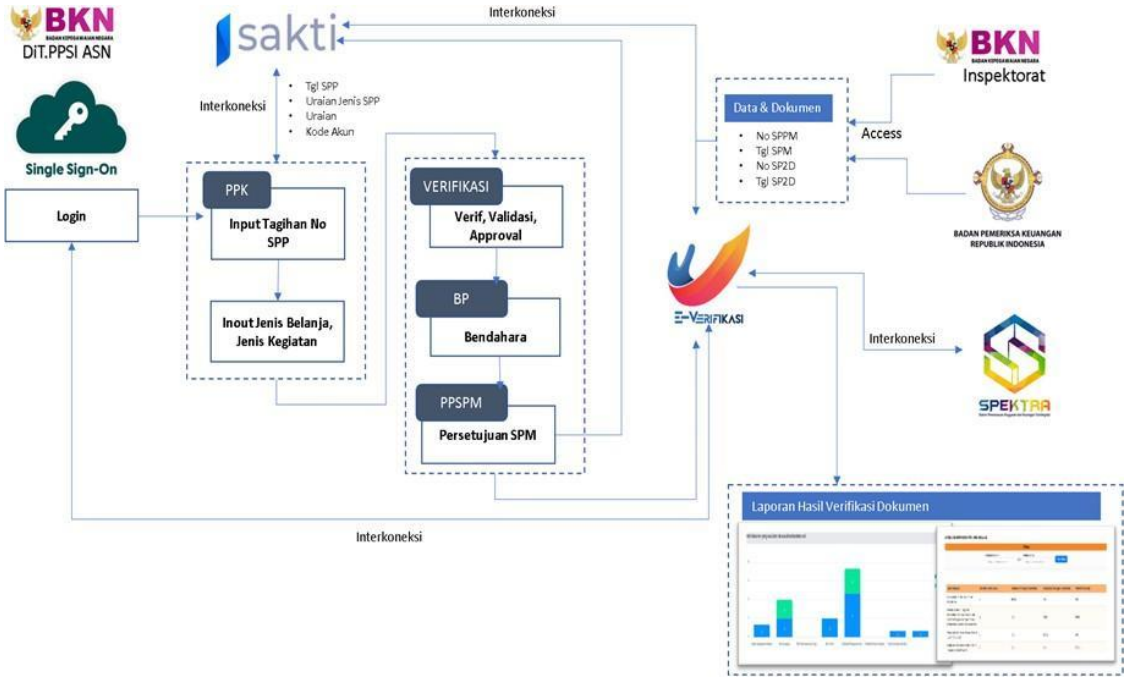

Gambar 3.4 Arsitektur Verifikasi

***Reform* 6. Tersedianya Strategi Komunikasi sehingga dapat Meningkatkan Publikasi BKN**

Masifnya penggunaan sosial media oleh masyarakat mengakibatkan perubahan pola konsumsi informasi bergerak dinamis. Untuk menjawab tantangan tersebut, BHHK menyiapkan strategi komunikasi yang menargetkan narasi utama yakni Satu Data ASN dikenal secara luas oleh publik. BHHK juga menyiapkan narasi pendamping yang disesuaikan dengan momentum atau isu insidental pemerintah secara umum. Untuk merealisasikan diseminasi dan publikasi program kerja BKN yang telah dituangkan ke dalam rencana aksi narasi utama "Satu Data ASN" dan narasi pendamping, BHHK memaksimalkan penggunaan media sosial dengan berorientasi pada audio-visual dan storytelling. Dengan kata lain, BHHK ingin mengemas publikasi informasi program kerja BKN dengan cara sesederhana mungkin dan menyesuaikan tren komunikasi masyarakat saat ini.

Reform* 7. Pengembangan website PPID dan aplikasi permohonan informasi secara *Online

Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses lebih mudah. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama akan mengembangan website PPID dan aplikasi permohonan informasi secara online sehingga memudahkan *stakeholder* untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Reform* 8. Peningkatan Layanan *Helpdesk* Keuangan Belanja Pegawai berbasi WA *Blast

Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan BKN Pusat Jakarta maka dibutuhkan Peningkatan layanan Keuangan terutama terhadap informasi penghasilan kepada pegawai meliputi Gaji, Tunjangan Kinerja dan Uang Makan dari SMS Blast ke API WhatsApp Business mengingat sebagian besar pegawai sudah familiar terhadap penggunaan Smartphone.

Layanan informasi pembayaran belanja pegawai dikelola oleh Biro Keuangan menggunakan WA Blast yang fasilitasnya tidak hanya sebagai notifikasi satu arah seperti yang selama ini yang telah berjalan, tetapi juga dapat digunakan oleh Pegawai sebagai media *Helpdesk* dalam memberikan layanan informasi belanja pegawai lainnya.

***Reform* 9. *Refocusing Roadmap* RB BKN 2020 - 2024 dengan Mendasarkan Pada Hasil *Scenario Planning* Transformasi Digital BKN mendukung RB Tematik**

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional telah memasuki periode akhir, yang diharapkan ada tahun 2025 akan menghasilkan *governance* yang berkualitas. Namun demikian dalam pelaksanaan tahun ketiga pada periode ketiga ini, berdasarkan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi, ternyata capaian reformasi birokrasi secara nasional belum dapat mendukung pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dan pembangunan nasional sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keberhasilan dalam reformasi birokrasi harusnya sejalan dengan pembangunan nasional.

Capaian reformasi birokrasi sampai dengan tahun ketiga periode ketiga ini ternyata hanya menghasilkan capaian keberhasilan dalam birokrasi itu sendiri, dan dampak dari keberhasilan tersebut tidak terlihat pada dukungan terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pembangunan. Untuk itulah pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB mengeluarkan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik pada akhir tahun 2022 dan diimplementasikan pada tahun 2023. Tujuan kebijakan reformasi birokrasi tematik adalah untuk (1) mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat; (2) menunjukkan kontribusi reformasi birokrasi secara langsung terhadap program prioritas pembangunan nasional dan (3) mempercepat penyelesaian permasalahan di masyarakat. Reformasi birokrasi ini bekerja dengan melakukan *debottlenecking* .

Badan Kepegawaian Negara menindaklanjuti kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik ini dengan melakukan *refocusing* terhadap *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKN tahun 2020-2024. Sebagai langkah awal dalam melakukan refocusing adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi BKN tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022. Hasil evaluasi terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi BKN yaitu :

1. *Roadmap* reformasi birokrasi BKN 2020-2024 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga rencana kerja dan RATL yang disusun dan dilaksanakan oleh RB Instansional maupun RB unit pusat dan kantor regional belum sepenuhnya mengacu pada roadmap;
2. Belum adanya keterkaitan dan kesesuaian antara kegiatan reformasi birokrasi di pusat (RB Instansi) dan RB Unit Pusat dan kantor regional, sehingga pelaksanaan RB belum sepenuhnya terintegrasi;
3. Roadmap RB BKN 2020-2024 belum mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dan ke depan; sehingga perlu ada kajian tentang transformasi BKN ke depan, salah satu metode adalah dengan menggunakan *scenario planning*

Mendasarkan pada hasil evaluasi tersebut, dan dalam rangka melaksanakan mandat untuk melaksanakan RB tematik, perlu segera dilakukan *refocusing* terhadap Roadmap RB BKN 2020-2024.

***Reform* 10. Penataan Kelembagaan BKN**

Perubahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mendasari adanya perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang UU ASN, hal-hal yang mendasari perubahan antara lain:

a. pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;

Berdasarkan hal tersebut, target *reform* pada tahun 2023 adalah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang BKN. Selain itu, untuk menjelaskan secara teknis peraturan tersebut, perlu disusun aturan tentang Organisasi dan Tata Kelola BKN sesuai dengan Perpres terbaru. Oleh karena itu, pada tahun 2023 target lain yang mendukung penataan kelembagaan BKN adalah dengan disusunnya draft/konsep Peraturan BKN tentang OTK di lingkungan BKN Pusat, Kanreg, UPT, dan BPASN.

***Reform* 11. Percepatan Peremajaan BMN**

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada perubahan pola kerja yang menyebabkan kebutuhan akan fasilitas penunjang pekerjaan terus berubah. Sebagian besar PC yang saat ini dipegang oleh pegawai merupakan pengadaan BMN pada tahun 2015/2016 yang secara umum manfaat sudah melewati batasnya (maks 5 tahun).

Selain PC, peralatan gedung juga sudah cukup lama tidak diganti sehingga menyebabkan beberapa kendala antara lain hydrant bocor, *lift* yang berkendala, dan beberapa meubeler yang usang. Oleh karena itu, di tahun 2023 fokus percepatan peremajaan BMN terbagi menjadi 4 bagian yakni PC, lift gedung 1, *hydrant*, dan meubelair. Namun tidak menutup kemungkinan juga peremajaan di luar 4 bagian tersebut.

***Reform* 12. Pengajuan Anggaran melalui SBSN untuk Pembangunan UPT**

Keterbatasan anggaran rutin untuk memenuhi kebutuhan pembangunan UPT menyebabkan Biro Umum harus mencari anggaran di luar anggaran rutin untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan UPT. Adapun pembangunan UPT diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di berbagai daerah dan bisa digunakan sebagai titik ujian yang terstandar sehingga diharapkan kedepannya setiap warga negara bisa mengikuti tes seleksi CASN dengan baik.

Tahapan kegiatan di tahun 2023 fokus kepada tujuan akhir persetujuan anggaran SBSN sehingga BKN bisa mulai membangun pada tahun 2024.

1. Pengajuan proposal permintaan anggaran pembangunan UPT
2. Penyusunan kelengkapan dokumen seperti kajian rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, izin prinsip dari Sekretaris Kabinet, dan kajian dampak yang dihasilkan dari pembangunan UPT
3. Persetujuan anggaran untuk tahun 2024

***Reform* 13. Optimalisasi TIK dalam Pengelolaan Aset/BMN**

Aplikasi pengelolaan aset/BMN saat ini masih belum berjalan dengan optimal. Masing-masing subbagian seperti pemeliharaan, pencatatan, penghapusan, dan pendistribusian memiliki mekanisme kerja yang berbeda dan belum terintegrasi dengan aplikasi milik Kementerian Keuangan selaku pembina pengelolaan BMN. Selain itu, cakupan aplikasi juga terbatas pada lingkungan kerja BKN Pusat, sehingga masing-masing kantor regional dan UPT memiliki mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi pengelolaan BMN yang bisa mencakup seluruh kebutuhan pengelolaan BMN dan bisa digunakan di semua unit kerja di BKN.

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan sistem aplikasi pengelolaan BMN
2. Perancangan sistem aplikasi pengelolaan BMN
3. Pembuatan sistem aplikasi pengelolaan BMN
4. Uji coba aplikasi pengelolaan BMN oleh pengelola BMN unit kerja di lingkungan BKN
5. Mengintegrasikan database aplikasi dengan aplikasi SAKTI milik Kemenkeu
6. Pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi pengelolaan BMN
7. Monitoring dan evaluasi uji coba aplikasi pengelolaan BMN

***Reform* 14. Optimalisasi Pemanfaatan Hibah**

Fasilitas yang dimiliki oleh BKN saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Contohnya fasilitas rumah dinas untuk pejabat eselon I yang saat ini berjumlah 7 orang, saat ini baru 6 yang bisa dipenuhi. Namun, pemanfaatan hibah tidak hanya terbatas pada rumah atau tempat tinggal, saat ini Biro Umum juga berupaya untuk mencari aset rampasan yang bisa dimanfaatkan sebagai gedung Kantor sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepegawaian.

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait kemungkinan tersedianya aset rampasan yang belum dimanfaatkan
2. Bersurat resmi ke institusi KPK/Kejaksaan
3. KPK/Kejaksaan memberikan informasi terkait BMN yang bisa dihibahkan
4. KPK/Kejaksaan mengirimkan surat permohonan pemindahtanganan BMN
5. Pemanfaatan hibah BMN tahun 2022
6. Kemenkeu mengeluarkan surat keputusan tentang tambahan BMN yang bisa dimanfaatkan oleh BKN.

Secara garis besar reform optimalisasi pemanfaatan hibah akan fokus kepada dua hal yakni pemanfaatan aset yang sudah diterima dan permintaan penambahan aset hibah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pekerjaan.

***Reform* 15. Percepatan Implementasi Katalog Sektoral pada Seluruh Satker BKN**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa masing-masing instansi perlu untuk memanfaatkan katalog sektoral pengadaan barang/jasa pemerintah agar pengadaan barang/jasa cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik.

Pelaksanaan pembelian dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-*Purchasing*) melalui katalog elektronik dapat dilaksanakkan dengan metode negoisasi harga, mini kompetisi, dan competitive catalogue. Tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait dengan katalog sektoral;
2. Mendorong proses pengadaan barang/jasa melalui katalog sektoral BKN di seluruh satker BKN;
3. Pendampingan kepada pelaku usaha untuk menayangkan produk di dalam katalog sektoral;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi katalog sektoral.

Harapannya di tahun ini 50% Satker yang ada di BKN sudah bisa menggunakan katalog sektoral untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan.

***Reform* 16. Percepatan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI**

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Biro Umum berkomitmen untuk melakukan percepatan penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BKN. Pendampingan akan terus dilakukan ke seluruh unit kerja di BKN dengan indikator capaian masing-masing unit kerja memahami cara mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI. Pendampingan tersebut akan dimonitor serta evaluasi serta dilakukan tindak lanjut dalam bentuk surat himbauan terkait pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan ke seluruh unit kerja di BKN
2. Melakukan monitoring terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BKN
3. Menyampaikan hasil monitoring tersebut kepada Sekretaris Utama untuk himbauan penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada seluruh unit kerja
4. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SRIKANDI

Diharapkan bahwa dengan adanya percepatan penggunaan aplikasi SRIKANDI akan ada peningkatan nilai capaian hasil audit kearsipan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip aktif dalam hal ini persuratan.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Tahun 2020-2024, perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 ini merupakan acuan bagi unit eselon II mandiri di bawah lingkup Sekretaris Utama dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2023. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN

REKAP 1: K/L

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L)

TAHUN 2020 - 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. VISI :
Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

3. MISI :
1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN					
01.01	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK	5	20	40	60	100
01.02	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	85	90	100	100	100
02	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima					
02.01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	85	86	87	88	95
02.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	85	86	87	88	95
03	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN					
03.01	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	100	100	100	100	100
04	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN					
04.01	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN	85	90	95	100	100
05	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN					
05.01	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	75	80	85	90	95
06	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN					
06.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti	30	65	85	95	100
07	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
07.01	Indeks Profesionalitas ASN BKN	77	77	78	78	80
07.02	Indeks Maturitas SPBE BKN	3	3,2	3,5	3,7	4
07.03	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	80	81	82	83	85
07.04	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	75	77	79	81	85

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
07.05	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

5. PROGRAM, SASARAN PROGRAM, DAN DUKUNGAN SASARAN STRATEGIS

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM	SASARAN STRATEGIS
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	
CO.01	Terselenggaranya tata kelola manajemen ASN yang sesuai NSPK di instansi Pemerintah	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
CO.02	Terselenggaranya Pembinaaan dan Pelayanan Manajemen ASN	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima
CO.03	Terselenggaranya Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
CO.04	Meningkatnya Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN
CO.05	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN
CO.06	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN
088.WA	Program Dukungan Manajemen	
WA.01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal BKN	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	215.708.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.712.450,0	0,0	0,0	0,0	223.421.425,0
088.WA	Program Dukungan Manajemen	523.101.478,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523.101.478,0
Total		738.810.453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.712.450,0	0,0	0,0	0,0	746.522.903,0

7. PRAKIRAAN KEBUTUHAN

KODE	PROGRAM	TOTAL INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
			2021	2022	2023	2024
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	223.421.425,0	2.353.697.573,0	5.488.360.259,0	5.928.648.654,0	6.396.147.244,0
088.WA	Program Dukungan Manajemen	523.101.478,0	582.178.308,0	599.297.967,0	613.784.244,0	626.211.981,0
Total		746.522.903,0	2.935.875.881,0	6.087.658.226,0	6.542.432.898,0	7.022.359.225,0

Jakarta, 20 Februari 2023

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. VISI :
Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

3. MISI :
1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2023 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	14.500.000,0
Total		14.500.000,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN		12.536.577,0
01.01	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK	60	
01.02	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	100	
02	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima		28.699.248,0
02.01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	88	
02.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	88	
03	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN		6.002.742,0
03.01	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	100	
04	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN		500.000,0
04.01	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN	100	
05	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN		8.264.982,0
05.01	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	90	
06	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN		3.521.450,0
06.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti	95	
07	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		548.847.345,0
07.01	Indeks Profesionalitas ASN BKN	78	
07.02	Indeks Maturitas SPBE BKN	3,7	
07.03	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	83	
07.04	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	81	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
07.05	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	
Total			608.372.344,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											PRAKI
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	50.422.933,0	9.102.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.524.999,0	84.873.081,
088.WA	Program Dukungan Manajemen	547.053.025,0	1.794.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548.847.345,0	587.914.957,
Total		597.475.958,0	10.896.386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608.372.344,0	672.788.038,

Jakarta, 20 Februari 2023
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Keuangan
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama